

**PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIFITAS KEGIATAN PENGKREDITAN PADA
PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

SKRIPSI

*Diajukan Untuk Memenuhi Sebagian Syarat
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi (S.Ak)
Program Studi Akuntansi*



Oleh:

Nama : EVI DAYANTI
NPM : 1405170207
Program Studi : AKUNTANSI

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2018**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Muchtar Basri No. 3 (061) 66224567 Medan 20238



PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Sabtu, tanggal 24 Maret 2018, Pukul 14.00 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

MEMUTUSKAN

Nama : **EVI DAYANTI**
N P M : **1405170207**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Judul Skripsi : **PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN EFEKTIVITAS KEGIATAN PERKREDITAN PADA PT. BANK SUMUT KANTOR PUSAT MEDAN**

Dinyatakan : **(C/B) Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.**

TIM PENGUJI

Penguji I

Drs. H. HOTMAL JA'FAR, Ak., M.M

Penguji II

SUKMA LESMANA, S.E., M.Si

Pembimbing

Dr. Hj. MAYA SARI, S.E., AK, M.Si

PANITIA UJIAN

Ketua



H. JANURI, S.E., M.M., M.Si

Sekretaris

ADE GUNAWAN, S.E., M.Si



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS

Jl. Kapt. Mukhtar Basri No.3 Telp. (061) 6623301 Fax. (061) 6625474

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi ini disusun oleh:

Nama : **EVI DAYANTI**
N P M : **1405170207**
Program Studi : **AKUNTANSI**
Konsentrasi : **AKUNTANSI PEMERIKSAAN**
Judul Skripsi : **PERAN AUDIT OPERASIONAL DALAM MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS PERKREDITAN PADA PT. BANK SUMUT
KANTOR PUSAT MEDAN**

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam Ujian Mempertahankan skripsi.

Medan, Maret 2018

Pembimbing Skripsi

(Dr. Hj. MAYA SARI, SE., Ak, M.Si)

Diketahui/Disetujui
oleh:

Ketua Program Studi Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

Dekan
Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU

(FITRIANI SARAGIH, SE, M.Si)



(H. JANURI, SE, MM, M.Si)

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Evi Dayanti

NPM : 1405170207

Jurusan : Akuntansi

Judul Skripsi : Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan
Perkreditan Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Dengan ini saya menyatakan bahwa benar saya memperoleh data penelitian dari kantor dimana saya melakukan riset yaitu PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yang beralamat di Jalan Imam Bonjol No. 18 Medan, Sumatera Utara.

Dan apabila dikemudian hari data – data dari skripsi ini salah dan merupakan hasil Plagiat karya orang lain maka dengan ini saya bersedia menerima sanksi akademik.

Demikian surat pernyataan ini saya perbuat dengan sebenar – benarnya untuk dapat dipergunakan seperlunya.

Medan, Maret 2018

Yang Membuat Pernyataan



Evi Dayanti

ABSTRAK

Evi Dayanti. NPM. 1405170207. Peran Audit Operasional Dalam Meningkatkan Efektifitas Kegiatan Pengkreditan Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan. Skripsi, 2018

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan audit operasional yang diterapkan Bank Sumut Kantor Pusat sebagai hasil interpretasi terhadap SPFAIB dan untuk mengetahui peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank Sumut Kantor Pusat. Penelitian ini menggunakan pendekatan studi kasus dengan metode deksriptif yang memaparkan bagaimana pelaksanaan audit operasional pada Bank Sumut Kantor Pusat. Data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder berupa dokumentasi dan hasil wawancara dengan auditor internal kredit dan bagian lain yang terkait. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pelaksanaan audit operasional belum memadai terlihat dari kredit bermasalah yang cukup tinggi dan mengakibatkan laba perusahaan menurun. Dan sesuai ketentuan Bank Indonesia yang menyatakan tingkat kolektibilitas kredit Non Performance Loan 5 %.

Audit operasional belum berperan dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan. Hal ini bisa dilihat keadaan *non performing loan* diatas 5% dari yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia. Walaupun mengalami penurunan dari tahun tahun tertentu akan tetapi masih belum bisa mencapai efektivitas kegiatan perkreditan karena penurunan yang terjadi masih belum mencapai angka dibawah 5%.

Kata Kunci : Audit Operasional, Efektivitas, Kegiatan Perkreditan

Kata Pengantar



Assalamu'alaikum warahma'tullahi wabarakatuh

Puji dan syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu Wata'ala yang telah melimpahkan berkah dan rahmatnya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi sesuai dengan waktu yang diharapkan. Dan tak lupa pula penulis mengirimkan shalawat dan salam atas junjungan kita Nabi Muhammad SAW Sebagai rahmatan lil'alam.

Skripsi ini disusun guna memenuhi tugas dari salah satu program yang merupakan bentuk kewajiban dan penyempurnaan nilai terhadap kami selaku mahasiswa di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan pendidikan studi Strata I Jurusan Akuntansi.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada banyak pihak yang telah membantu dalam penyelesaian penyusunan skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu Wata'ala. Atas berkah, rahmat dan kesehatan yang telah di berikan-Nya kepada penulis sehingga saat ini penulis dapat menyelesaikan laporan skripsi ini.
2. Untuk yang teristimewa ayahanda Legimin, dan ibunda tercinta Asni Harahap yang membesarkan dan mendidik penulis dengan rasa cinta dan

kasih sayang memberikan dorongan/dukungan dan Do'a semangat baik yang mempengaruhi kehidupan penulis.

3. Untuk kakakku tersayang Irma Yani dan Tuti Herawati yang ikut memberi Do'a dan menyemangati penulis hingga penulis mampu menyelesaikan tugas ini dengan tepat waktu.
4. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Januri, S.E, M.M, M.si selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Fitriani Saragih, S.E, M.si selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Ibu Zulia Hanum, S.E, M.si selaku Sekertaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
8. Ibu Dr. Hj. Maya Sari S.E, Ak.M.si selaku dosen Pembimbing saya yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini.
9. Seluruh Dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
10. Pimpinan, seluruh Staff dan Pegawai PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan
11. Terima kasih kepada Sahabat seperjuangan Rika Sucianti, Dania Putri, Kadek Srijannah, Anis Iis, Henny Syariani dan Elis Sahara yang telah memberikan semangat dalam penulisan skripsi ini.

12. Terima kasih juga kepada sahabat fillahku Riza Apriana, Ayu Wulandari, Cindy Fordilla yang telah memberikan dorongan baik kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini.
13. Buat keponakan tersayangku Andia Novi Ramadhani, Rafly Hamdani, Fauzan Alfa Rizky dan Mutiara Irfan.
14. Dan Seluruh teman seperjuangan dikelas VII A Akuntansi Malam, terima kasih pengalaman selama 3 tahun yang penulis lalui bersama kalian.
Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi kita semua dan kiranya Allah Ta'ala senantiasa selalu melimpahkan Rahmat dan Karunia-Nya untuk kita semua.
Akhir kata penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu, semoga Allah selalu melimpahkan Rahmat dan Hidayah-Nya kepada kita semua, Aamiin Allahumma Aamiin...

Medan, Maret 2018

Penulis

EVI DAYANTI

1405170207

DAFTAR ISI

ABSTRACT

KATA PENGANTAR.....	i
DAFTAR ISI.....	iv
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	5
1.3 Batasan Masalah	5
1.4 Perumusan Masalah	6
1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	6
BAB II LANDASAN TEORI	7
2.1 Uraian Teoritis	7
2.1.1 Auditing	7
a. Pengertian Auditing	7
b. Tipe-tipe Audit	9
2.1.2 Audit Operasional.....	10
a. Pengertian Audit Operasional	10
b. Kriteria dan ruang lingkup Audit Operasional	12
c. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional	14
d. Tipe-tipe Audit Operasional	16
e. Tahap Audit Operasional	17
f. Pelaksanaan Audit Operasional	23

g. Perbedaan Audit keuangan dengan Operasional	24
2.1.3 Bank	24
a. Defenisi Bank	24
b. Fungsi dan tugas Bank	25
2.1.4 Kredit.....	26
a. Pengertian Kredit	26
b. Tujuan dan Fungsi kredit	27
c. Jenis kredit	29
d. Analisis kredit	29
2.1.5 Kegiatan Perkreditan.....	29
2.1.6 Efektivitas	36
a. Efektivitas Kegiatan Perkreditan	36
2.2 Penelitian Terdahulu	39
2.3 Kerangka Konseptual.....	44
BAB III METODE PENELITIAN.....	46
3.1 Pendekatan Penelitian	46
3.2 Defenisi Operasional.....	46
3.3 Tempat dan waktu penelitian	47
3.4 Jenis Data	48
3.5 Teknik Pengumpulan Data	49
3.6 Teknik Analisis Data	50
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	52
4.1 Hasil penelitian	52
4.1.1 Deskripsi audit operasional kegiatan perkreditan	52

4.1.2 Deskripsi kredit bermasalah (NPL)	52
4.2 Pembahasan	59
4.2.1 Prosedur pemberian Kredit	59
4.2.2 Pelaksanaan Audit Operasional	60
4.2.3 Pelaporan hasil audit	63
4.2.4 Tindak Lanjut hasil audit	63
4.2.5 Dokumentasi dan Administrasi	64
4.2.6 Peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas	64
BAB V KESIMPULAN	66
5.1 Kesimpulan	66
5.2 Saran	67
DAFTAR PUSTAKA	ix

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Data penelitian kredit bermasalah tahun 2013-2017	4
Tabel 2.2 Penelitian terdahulu	39
Tabel 3.1 Rincian waktu penelitian	48
Tabel 4.1 Data kualitas kredit Bank Sumut	54
Tabel 4.2 Data kredit bermasalah Non Performance Loan	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.3 Kerangka Berfikir.....	45
Gambar 4.2 Grafik Non Performance Loan	46

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Perkembangan ekonomi perbankan di Indonesia dihadapkan pada tingkat persaingan yang semakin ketat. Persaingan tersebut tidak hanya terjadi antar bank, tetapi juga datang dari lembaga keuangan lain yang berhasil mengembangkan produk-produk keuangan baru. Persaingan dan perkembangan yang cukup pesat pada usaha perbankan tersebut membuat masing-masing lembaga perbankan harus berlomba untuk memenangkan persaingan bisnis. Oleh karena itu, lembaga perbankan perlu meningkatkan kinerjanya untuk dapat bertahan dalam situasi krisis atau memenangkan persaingan dalam era globalisasi.

Pengertian Bank itu sendiri sebagaimana tercantum dalam UU RI no.10 tahun 1998 adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan dana dari masyarakat dalam bentuk kredit atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Suatu Bank harus mampu bersaing dengan lembaga keuangan Bank ataupun nonbank untuk dapat bertahan. Adanya globalisasi ekonomi saat ini dengan menjaga kesehatan Bank nya. Bank secara individual dikatakan sehat jika mampu memelihara kontinuitas usahanya dengan baik, sehingga dapat memenuhi kewajibannya terhadap semua pihak yang berkepentingan serta dapat menunjang sistem perbankan yang sehat dan efisien. Dalam arti, pemilik memperoleh keuntungan yang wajar, masyarakat dilindungi kepentingannya, dapat memenuhi kebutuhan dunia usaha akan pembiayaannya, dan akhirnya dapat menunjang

sistem perbankan secara keseluruhan yang berarti menunjang perekonomian pada umumnya.

Begitu pentingnya kesehatan Bank sehingga tuntutan terhadap pengawasan Bank semakin besar pula, oleh karena itu adanya peningkatan fungsi intermediasi Bank, peningkatan operasi perbankan juga menunjukkan bahwa resiko yang ditanggung oleh perbankan juga semakin besar. Disamping masalah-masalah internal, pengawasan yang efektif untuk menunjang pertumbuhan Bank yang sehat sangat diperlukan bila diperhatikan faktor-faktor eksternal, yaitu adanya persaingan tajam antarbank serta perkembangan pasar modal dan lembaga keuangan nonbank yang mempengaruhi minat masyarakat terhadap perkembangan pasar uang.

Pengawasan operasional Bank sangat diperlukan untuk menghindari resiko yang dapat merugikan Bank. Pengawasan operasional Bank dimaksudkan untuk memastikan bahwa kegiatan operasional Bank telah berjalan efektif dan efisien serta melakukan perbaikan atas segala permasalahan yang ditemukan. Sarana yang digunakan Bank untuk mengawasi efektivitas kegiatan operasionalnya adalah dengan melakukan audit operasional.

Audit operasional adalah penelaahan atas prosedur dan metode operasi entitas untuk menentukan tingkat efisiensi dan efektivitasnya. Audit operasional kadang-kadang disebut juga sebagai audit kinerja, audit manajemen atau audit komprehensif. Secara internasional, istilah yang paling sering digunakan untuk audit operasional adalah audit nilai uang (Dan M Guy;2003;419).

Salah satu operasional utama Bank yang perlu dilakukan audit operasional adalah kegiatan kreditnya karena kredit merupakan aset Bank yang memiliki resiko (risk asset). Kredit dikuasai pihak luar yaitu pihak debitur yang mudah diselewengkan dan disalahgunakan. Penyaluran kredit yang diberikan kepada

masyarakat membutuhkan pengawasan yang terprogram dan terkendali sehingga kredit diberikan kepada nasabah yang bertanggungjawab dan dapat dipercaya untuk melunasi hutangnya tepat waktu.

Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam-meminjam antara Bank dengan pihak lain yang diwajibkan pihak meminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan pemberian bunga (Ismail;2011).

Penyaluran kredit yang tidak tepat sasaran akan menimbulkan resiko kredit bermasalah bagi Bank yang akan menurunkan tingkat kesehatan Bank. Bank harus menekan resiko munculnya kredit bermasalah ini seminim mungkin. Ketentuan Bank Indonesia yang menyebutkan bahwa NonPerforming Loan's (NPL) atau kredit macet yang dialami oleh suatu Bank tidak boleh lebih dari 5% terhadap total baki debetnya. Bank sebagai lembaga intermediasi juga harus melaksanakan kegiatan perkreditan dengan menganut prinsip kehati-hatian (prudential priciple) agar kredit yang diberikan tepat gunadan tepat sasaran.

Selain memiliki unsur resiko, kredit juga memiliki unsur ketidakpastian dalam pengembalian kredit yang telah disalurkan. Ketidakpastian pengembalian kredit akan berpengaruh terhadap efektivitas kredit yang dijalankan. Untuk itu,sebelum kredit dicairkan Bank harus cermat dalam melaksanakan prosedur kredit agar kredit yang disalurkan kecil kemungkinan terjadinya kredit macet.

Pelaksanaan audit operasional terhadap kredit tidak lain adalah bertujuan untuk menekan dan memperkecil segala resiko yang ada dalam kredit agar kredit yang dijalankan tetap efektif dan efisien. Audit operasional terhadap kredit dilakukan dengan menelaah kembali prosedur kredit yang dijalankan untuk kemudian diberikan rekomendasi yang bertujuan untuk meningkatkan efesiensi dan efektivitas kredit.

Audit operasional bidang kredit juga dilakukan Bank Sumut Kantor Pusat Medan untuk meningkatkan efektivitas kredit. Dalam menjalankan kegiatan kredit, Bank Sumut Kantor Pusat Medan tidak dapat lepas dari yang namanya kredit bermasalah. Permasalahan kredit yang ditemukan dalam audit operasional pada Bank Sumut Kantor Pusat Medan ini diantaranya adalah kurang lengkapnya data analisis ketika survey pertama dilakukan dan kondisi usaha nasabah yang menurun. Masalah-masalah diatas mengakibatkan resiko kredit macet yang akan dihadapi oleh Bank. Sebagaimana tertera dalam tabel berikut:

Tabel 1.1

Data Penelitian

KETERANGAN	KREDIT DISALURKAN	OUTSTANDING KREDIT	NPL (%)
Tahun 2013	813.226.639.290	15,347,592,252,301	5,3%
Tahun 2014	1.063.027.382.984	16,555,020,311,176	6,5%
Tahun 2015	1.077.292.624.566	16,941,433,956,603	6,4%
Tahun 2016	968.525.152.861	17,576,934,553,849	5,6%
Tahun 2017	963.838.647.283	18,465,683,221,240	5,3%

Sumber: Bank Sumut Kantor Pusat

Berdasarkan data dapat diketahui bahwa pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan selama 5 tahun belakangan ini setelah diteliti mengalami peningkatan kredibilitas NPL yang signifikan. Hal ini tidak sesuai dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 6/10/PBI/2004 tanggal 12 April 2004 tentang Sistem Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum yang menetapkan bahwa rasio kredit bermasalah (NPL) adalah 5%. Semakin tinggi nilai NPL maka Bank

tersebut tidak sehat dan akan menyebabkan menurunnya laba yang akan diterima oleh Bank.

Berdasarkan fenomena ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.”**

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang disajikan maka dapat diidentifikasi masalah yang terjadi yaitu:

1. Terjadi peningkatan kredibilitas Non Performance Loan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan.

1.3 Batasan Masalah

Dalam penelitian ini, penulis membatasi masalah untuk jenis kredit modal kerja. Jadi, tinjauan terhadap audit operasional dibatasi pada pelaksanaan pemeriksaan atas kegiatan perkreditan Bank Sumut dalam menangani kredit bermasalah dan peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian diatas, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan?

1.5 Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui apakah audit operasional kegiatan perkreditan Bank Sumut Kantor Pusat telah dijalankan dengan efektif dan efisien.
2. Untuk mengetahui peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan

Sedangkan manfaat yang diharapkan akan dapat dicapai melalui penelitian ini adalah:

1. Bagi perusahaan, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai masukan dan memberikan gambaran tentang pentingnya audit operasional dalam menganalisis dan mengevaluasi pelaksanaan aktivitas manajemen dalam mencapai efektivitas kegiatan perkreditan.
2. Bagi penulis sendiri, hasil penelitian diharapkan dapat meningkatkan pengetahuan tentang audit operasional, khususnya dalam aktivitas perkreditan bank.
3. Bagi akademisi, hasil penelitian diharapkan dapat digunakan sebagai bahan referensi serta dapat menambah pengetahuan, menjadi sumber informasi dan bahan perbandingan untuk penelitian selanjutnya.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Uraian Teori

2.1.1 Auditing

a. Pengertian Auditing

Untuk mengetahui dengan jelas pengertian auditing, berikut ini akan dikemukakan definisi-definisi auditing yang diambil dari beberapa sumber.

Pengertian auditing menurut Mulyadi (2010 : 9) adalah :

“Secara umum auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi, dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan”.

Pengertian atau definisi menurut Arens et al (2008: 4) adalah :

“Auditing is the accumulation and evaluation of evidence about information to determine and report on the degree of correspondence between the information and established criteria. Auditing should be done by a competent, independent person.

Auditing adalah pengumpulan dan evaluasi bukti tentang informasi untuk menentukan dan melaporkan derajat kesesuaian antara informasi itu dan kriteria yang telah ditetapkan. Auditing harus dilakukan oleh orang yang kompeten dan independen. Dari definisi di atas, dapat disimpulkan beberapa aspek dari audit, yaitu :

1. Dalam audit dilakukan tindakan-tindakan menyimpulkan (*accumulate*), mengevaluasi (*evaluate*), menentukan (*determine*), dan melaporkan (*report*).

2. Untuk melakukan audit, harus tersedia informasi dalam bentuk yang dapat diverifikasi dan beberapa standar (*kriteria*) yang dapat digunakan auditor untuk mengevaluasi informasi tersebut.
3. Untuk memenuhi tujuan audit, auditor harus memperoleh bukti dengan kualitas dan jumlah yang mencukupi. Bukti (*evidence*) adalah setiap informasi yang digunakan auditor untuk menentukan apakah informasi yang diaudit dinyatakan sesuai dengan kriteria yang telah ditetapkan.
4. Auditor harus memiliki kualifikasi untuk memahami kriteria yang digunakan dan harus kompeten untuk mengetahui jenis serta jumlah bukti yang akan dikumpulkan guna mencapai kesimpulan yang tepat setelah memeriksa bukti itu.

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003) audit adalah :

“Suatu proses sistematis untuk memperoleh serta mengevaluasi bukti secara objektif mengenai asersi-aseri kegiatan dan peristiwa ekonomi, dengan tujuan menetapkan derajat kesesuaian antara asersi-aseri tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan sebelumnya serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pihak-pihak yang berkepentingan”.

Beberapa ciri penting yang ada dalam definisi tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Suatu proses sistematis berupa serangkaian langkah atau proses yang logis, terstruktur, dan terorganisir.
2. Memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif berarti memeriksa dasar asersi serta mengevaluasi hasil pemeriksaan tersebut tanpa memihak dan berprasangka, baik untuk atau terhadap perorangan (entitas) yang membuat asersi tersebut.

3. Asersi tentang kegiatan dan peristiwa ekonomi merupakan representative yang dibuat oleh perorangan atau entitas.
4. Derajat kesesuaian menunjuk pada pendekatan di mana asersi dapat diidentifikasi dan dibandingkan dengan kriteria yang telah ditetapkan.
5. Kriteria yang telah ditetapkan adalah standar-standar yang digunakan sebagai dasar untuk menilai asersi atau pernyataan. Penyampaian hasil diperoleh melalui laporan tertulis yang menunjukkan derajat kesesuaian antara asersi dan kriteria yang telah ditetapkan.
6. Pihak-pihak yang berkepentingan adalah mereka yang menggunakan (atau mengandalkan) temuan-temuan auditor.

b. Tipe Audit

Audit dapat dibagi menjadi beberapa tipe. Pembagian ini dimaksudkan untuk menentukan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai dengan diadakannya suatu kegiatan audit tersebut. Mulyadi (2010 : 30-32) menyatakan auditing umumnya digolongkan menjadi 3 golongan yaitu audit laporan keuangan, audit kepatuhan, dan audit operasional.

1. Audit Laporan Keuangan (*Financial Statement Audit*)

Audit laporan keuangan adalah audit yang dilakukan oleh auditor independen terhadap laporan keuangan yang disajikan oleh kliennya untuk menyatakan pendapat mengenai kewajaran laporan keuangan tersebut. Dalam laporan keuangan ini, auditor independen menilai kewajaran laporan keuangan atas dasar kesesuaiannya dengan prinsip akuntansi berterima umum.

2. Audit Kepatuhan (*Compliance Audit*)

Audit kepatuhan adalah audit yang tugasnya untuk menentukan apakah yang diaudit sesuai dengan kondisi atau peraturan tertentu. Audit kepatuhan banyak dijumpai dalam pemerintahan.

3. Audit Operasional (*Operational Audit*)

Audit operasional merupakan review secara sistematis kegiatan organisasi atau bagian dari padanya, dalam hubungannya dengan tujuan tertentu. Tujuan audit operasional adalah untuk :

1. Mengevaluasi kinerja
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk peningkatan
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut.

2.1.2 Audit Operasional

a. Pengertian Audit Operasional

Menurut Boynton, Johnson, Kell (2003) audit operasional adalah :

“suatu proses sistematis yang mengevaluasi efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi organisasi yang berada dalam pengendalian manajemen serta melaporkan kepada orang-orang yang tepat hasil-hasil evaluasi tersebut beserta rekomendasi perbaikan.”

Bagian – bagian penting dari definisi ini adalah sebagai berikut :

1. Proses yang sistematis. Seperti dalam audit laporan keuangan, audit operasional menyangkut serangkaian langkah atau prosedur yang logis, tersruktur, dan terorganisasi.
2. Mengevaluasi operasi organisasi. Evaluasi atas operasi ini harus didasarkan pada beberapa kriteria yang ditetapkan dan disepakati.

3. Efektivitas, efisiensi dan kehematan operasi. Tujuan utama dari audit operasional adalah membantu manajemen organisasi yang diaudit untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan kehematan operasi.
4. Melaporkan kepada orang-orang yang tepat. Penerima laporan audit operasional yang tepat adalah manajemen atau individu atau badan yang meminta audit.
5. Rekomendasi perbaikan. Tidak seperti laporan audit laporan keuangan, audit operasional tidak berakhir dengan menyajikan laporan mengenai temuan. Pengembangan rekomendasi, sebenarnya, merupakan salah satu aspek yang paling menantang dalam jenis audit ini.

Definisi audit operasional yang dikemukakan oleh Arens et al (2008 : 13) yaitu:

“An operational audit evaluates the efficiency and effectiveness of any part of an organization’s operating procedures and method”.

Audit operasional adalah mengevaluasi efisiensi dan efektivitas setiap bagian dari prosedur dan metode operasi organisasi. Audit operasional lebih berorientasi ke masa depan, artinya hasil dari penilaian berbagai kegiatan operasional tersebut diharapkan dapat membantu manajemen dalam meningkatkan efektivitas pencapaian tujuan yang ditetapkan oleh badan usaha.

Audit operasional menurut Strawser, Jerry R and Robert H. Strawser (2001 :20-17) :

“Operational Auditing provides benefits to the organization by improving the efficiency, economy, and effectiveness of its operations”

Menurut American Institute of Certified Public Accountants/ AICPA dalam Strawser, Jerry R and Robert H. Strawser (2001 : 20-23) :

“Operational audit is a systematic review of an organization activities....inrelation to specified objectives. The purpose of the engagement may be: (a) to asses performance, (b) to identify opportunities for improvement, and (c) to develop recommendation for improvement or further action”.

Dari definisi yang diberikan oleh AICPA tersebut dapat kita lihat bahwa audit operasional merupakan suatu tinjauan yang sistematis dari aktivitas organisasi, hal ini dilakukan untuk mencapai tujuan. Diantara tujuannya itu adalah untuk :

1. Menilai kinerja
2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan
3. Mengembangkan rekomendasi untuk perbaikan atau kegiatan lebih lanjut.

b. Kriteria dan Ruang Lingkup Audit Operasional

Kesulitan utama yang umumnya dihadapi dalam audit operasional adalah menentukan kriteria audit untuk mengevaluasi efisiensi dan efektivitas organisasi. Berbeda dengan audit keuangan, dalam audit operasional tidak terdapat kriteria tertentu yang berlaku umum untuk setiap audit. Kriteria adalah nilai-nilai ideal yang digunakan sebagai tolak ukur dalam perbandingan. Dengan adanya kriteria, pemeriksaan dapat menentukan apakah suatu kondisi yang ada menyimpang atau tidak dan kondisi yang diharapkan. Karena pemeriksaan pada intinya merupakan proses perbandingan antara kenyataan yang ada dengan suatu kondisi yang diharapkan maka pada audit operasional pun diperlukan adanya kriteria. Arens et al (2008 : 847) menyebutkan beberapa kriteria yang dapat digunakan dalam audit operasional, yaitu :

1. *Historical Performance* (Kinerja Historis)

Merupakan seperangkat kriteria sederhana yang dapat didasarkan padahasil audit periode sebelumnya. Gagasan di balik penggunaan kriteria ini adalah

membandingkan apakah yang telah dilakukan menjadi “lebih baik” atau “lebih buruk”. Manfaat kriteria ini adalah bahwa kriteria tersebut mudah dibuat, tetapi mungkin tidak memberikan pandangan mendalam mengenai seberapa baik atau buruk sebenarnya unit usaha yang diperiksa dalam melakukan sesuatu.

2. *Benchmarking* (Kinerja yang dapat diperbandingkan)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil yang dicapai oleh organisasi lain yang sejenis. Walaupun penilaian prestasi masa lalu, tetapi hasil penilaian menggunakan kriteria ini pun belum tentu memberikan gambaran yang tepat mengenai keadaan organisasi, karena perbedaan situasi dan kondisi yang dihadapi oleh dua organisasi yang berbeda.

3. *Engineered Standards* (Standar Rekayasa)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan standar rekayasa, seperti penggunaan time and motion study untuk menentukan banyaknya output yang harus diproduksi.

4. *Discussion and Agreement* (Diskusi dan Kesepakatan)

Merupakan kriteria yang ditetapkan berdasarkan hasil diskusi dan persetujuan bersama antara manajemen dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam audit operasional.

Ruang lingkup audit operasional menurut Widjayanto, Nugroho (2001 : 19) adalah :

“Audit operasional mencakup tinjauan atas tujuan perusahaan, lingkungan perusahaan, lingkungan perusahaan beroperasi, personalia dan kadangkala mencakup fasilitas fisik”. Jadi dapat disimpulkan bahwa ruang lingkup merupakan seluruh aspek manajemen (baik seluruh atau sebagian dari program/ aktivitas

yang dilakukan), tinjauan kebijaksanaan operasinya, perencanaan, praktik (kinerja), hasil dari kegiatan dalam mencapai tujuan perusahaan. Oleh karena itu, audit dilakukan tidak terbatas hanya pada masalah akuntansinya saja, melainkan dari segala bidang yang berhubungan dengan perusahaan seperti kepegawaian.

c. Tujuan dan Manfaat Audit Operasional

Keputusan untuk mengadakan pemeriksaan operasional oleh pihak manajemen mempunyai tujuan dan manfaat bagi perusahaan. Tujuan dari pemeriksaan operasional adalah salah satunya dengan melihat sampai mana kemajuan dari perusahaan. Setelah dilakukan audit operasional bisa dilihat oleh manajemen perusahaan apa saja keterbatasan dari perusahaan yang di audit.

Menurut Bayangkara, IBK (2008) :

“Audit operasional bertujuan untuk mengidentifikasi kegiatan, program, dan aktivitas yang masih memerlukan perbaikan, sehingga dengan rekomendasi yang diberikan nantinya dapat dicapai perbaikan atas pengelolaan berbagai program dan aktivitas pada perusahaan tersebut”.

Berkaitan dengan tujuan audit tersebut, titik berat audit diarahkan terutama pada berbagai objek audit yang diperkirakan dapat diperbaiki di masa yang akan datang, di samping juga mencegah kemungkinan terjadinya berbagai kerugian. Audit operasional dapat memberikan manfaat yang sangat berarti bagi kelanjutan suatu organisasi kedepannya. Oleh karena itu, untuk setiap organisasi sangat penting dilakukannya audit operasional ini.

Menurut Tunggal, Amin Widjaya (2000) ada tiga tujuan dilakukannya audit operasional yaitu :

1. Audit operasional dapat dijadikan sebagai alat untuk mengukur prestasi dari setiap bidang-bidang yang dijadikan sebagai objek

pemeriksaan. Kriteria prestasi itu dinilai dari tingkat efektivitas dan efisiensi yang dicapai.

2. Mengidentifikasi kesempatan untuk perbaikan. Pada setiap akhir audit operasional akan dihasilkan suatu laporan yang menjelaskan mengenai hasil pemeriksaan yang telah dilaksanakan. Dengan adanya laporan ini, akan membantu pihak manajemen dalam mengidentifikasi masalah yang timbul diperusahaan.
3. Membuat rekomendasi untuk perbaikan atau tindakan lebih lanjut. Masalah yang telah diidentifikasi dapat disajikan sebagai dasar bagi pihak manajemen untuk menyusun langkah-langkah perbaikan atau tindak lanjut yang diperlukan.

Dengan tercapainya tujuan tersebut, menurut Tunggal, Amin Widjaya (2000), audit operasional memberikan beberapa manfaat, antara lain sebagai berikut :

1. Memberikan informasi yang relevan dan tepat waktu untuk pengambilan keputusan.
2. Membantu manajemen dalam mengevaluasi catatan, laporan dalam pengendalian.
3. Memastikan ketaatan terhadap kebijakan manajemen yang diharapkan, rencana-rencana, prosedur serta persyaratan peraturan pemerintah.
4. Mengidentifikasi area masalah potensial pada tahap dini untuk menentukan tindakan yang akan diambil.
5. Menilai efisiensi pengguna sumber daya.

6. Menilai efektivitas dalam mencapai tujuan dan sasaran perusahaan yang telah ditetapkan.
7. Menyediakan tempat pelatihan personil dalam fase operasi perusahaan.

Dari uraian di atas, manfaat audit operasional berorientasi ke arah peningkatan prestasi manajemen di waktu yang akan datang yang bermanfaat bagi perusahaan itu sendiri. Hasil audit operasional diharapkan menemui titik fokus permasalahan yang mendasar dalam pelaksanaan kegiatan perusahaan.

d. Tipe Audit Operasional

Menurut Arens et al (2008 : 844-845) ada 3 tipe audit operasional terdiri dari :

1. Audit Fungsional (*Functional Audits*)

Audit fungsional berkaitan dengan sebuah fungsi atau lebih dalam suatu organisasi, misalnya fungsi pengeluaran kas, penerimaan kas, pembayaran gaji. Audit fungsional memungkinkan adanya spesialisasi oleh auditor. Auditor yang merupakan staf dari internal audit dapat lebih efisien memakai seluruh waktu mereka untuk memeriksa dalam bidang tersebut. Tapi di samping itu, audit fungsional memiliki kekurangan yaitu tidak dievaluasinya fungsi yang saling berkaitan.

2. Audit Organisasional (*Organizational Audits*)

Audit organisasional menyangkut keseluruhan unit organisasi, seperti departemen, cabang, atau anak perusahaan. Penekanan dalam audit ini adalah seberapa efisien dan efektif fungsi-fungsi saling berinteraksi. Rencana organisasi

dan metode-metode untuk mengkoordinasikan aktivitas yang ada, sangat penting untuk audit jenis ini.

3. Penugasan Khusus (*Special Assignments*)

Penugasan khusus timbul atas permintaan manajemen, sehingga dalam audit jenis ini terdapat banyak variasi. Misalnya adalah menentukan penyebab sistem EDP yang efektif, penyelidikan kemungkinan fraud dalam suatu divisi dan membuat rekomendasi untuk mengurangi biaya pembuatan suatu barang.

e. Tahap – Tahap Audit Operasional

Menurut Bank Indonesia No. 1/6/PBI/1999 Tgl. 20 Desember 1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank Umum, pelaksanaan audit dapat dibedakan dalam 5 (lima) tahap kegiatan yaitu tahap persiapan audit, penyusunan program audit, pelaksanaan penugasan audit, pelaporan hasil audit dan tindak lanjut hasil audit.

1. Persiapan Audit

Pelaksanaan audit harus dipersiapkan dengan baik agar tujuan audit dapat dicapai dengan cara efisien. Langkah yang perlu diperhatikan pada tahap persiapan audit meliputi penetapan penugasan, pemberitahuan audit dan penelitian pendahuluan.

- a. Penetapan penugasan audit dimaksudkan untuk pemberitahuan kepada auditor sebagai dasar untuk melakukan audit sebagaimana ditetapkan dalam rencana audit tahunan bank. Penetapan penugasan disampaikan oleh kepala SKAI kepada ketua dan tim audit dalam bentuk surat

penugasan, yang antara lain menetapkan ketua dan anggota tim audit, waktu yang diperlukan serta tujuan audit.

- b. Pelaksanaan Auditor Intern harus dilengkapi dengan surat pemberitahuan audit dari SKAI, yang dapat disampaikan kepada auditee sebelum atau pada saat audit dilaksanakan.
- c. Penelitian pendahuluan dimaksudkan untuk mengenal dan memahami setiap kegiatan atau fungsi Auditee secara umum supaya audit dapat difokuskan pada hal-hal yang strategis. Dalam tahap ini Auditor harus mengenal dengan baik aspek-aspek dari Auditee antara lain fungsi, struktur organisasi, wewenang dan tanggung jawab, kebijakan, sistem dan prosedur operasional, risiko kegiatan dan pengendaliannya, indikator keberhasilan, aspek legal dan ketentuan lainnya.

2. Penyusunan Program Audit

Berdasarkan hasil penelitian pendahuluan, maka disusun program audit.

Program audit harus:

- a. merupakan dokumentasi prosedur bagi Auditor Intern dalam mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan informasi dan mendokumentasikan informasi selama pelaksanaan audit, termasuk catatan untuk pemeriksaan yang akan datang;
- b. menyatakan tujuan audit;
- c. menetapkan luas, tingkat dan metodologi pengujian yang diperlukan guna mencapai tujuan audit untuk tiap tahapan audit;
- d. menetapkan jangka waktu pemeriksaan;

- e. mengidentifikasi aspek-aspek teknis, risiko, proses dan transaksi yang harus diuji, termasuk pengolahan data elektronik.

Adanya program audit secara tertulis akan memudahkan pengendalian audit selama tahap-tahap pelaksanaan. Program audit tersebut dapat diubah sesuai dengan kebutuhan selama audit berlangsung.

3. Pelaksanaan Penugasan Audit

Tahap pelaksanaan audit meliputi kegiatan mengumpulkan, menganalisis, menginterpretasikan dan mendokumentasikan bukti-bukti audit serta informasi lain yang dibutuhkan, sesuai dengan prosedur yang digariskan dalam program audit untuk mendukung hasil audit. Proses audit meliputi kegiatan-kegiatan sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan bukti dan informasi yang cukup, kompeten dan relevan.
- b. Memeriksa dan mengevaluasi semua bukti dan informasi untuk mendapatkan temuan dan rekomendasi audit.
- c. Menetapkan metode dan tehnik sampling yang dapat dipakai dan dikembangkan sesuai dengan keadaan.
- d. Supervisi atas proses pengumpulan bukti dan informasi serta pengujian yang telah dilakukan.
- e. Mendokumentasikan Kertas Kerja Audit.
- f. Membahas hasil audit dengan Auditee.

4. Pelaporan Hasil Audit

Setelah selesai melakukan kegiatan audit, Auditor Intern berkewajiban untuk menuangkan hasil audit tersebut dalam bentuk laporan tertulis. Laporan

tersebut harus memenuhi standar pelaporan, memuat kelengkapan materi dan melalui proses penyusunan yang baik. Proses penyusunan laporan perlu dilakukan dengan cermat agar dapat disajikan laporan yang akurat dan bermanfaat bagi Auditee. Proses tersebut antara lain mencakup:

- a. Kompilasi dan analisis temuan audit. Temuan audit yang akan dituangkan dalam laporan harus dikompilasi dan dianalisis tingkat signifikasinya.
- b. Konfirmasi dengan Auditee. Temuan audit harus dikonfirmasi dengan Auditee untuk diketahui dan dipahami.
- c. Diskusi dengan Kepala SKAI. Temuan audit yang sudah dikompilasi dan dianalisis harus dilaporkan serta didiskusikan dengan Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk.
- d. Diskusi dengan Auditee. Diskusi ini dimaksudkan agar Auditee memberikan komitmen dan bersedia melakukan perbaikan dalam batas waktu tertentu yang dijanjikan.
- e. Review laporan. Konsep laporan yang disusun oleh tim audit direview oleh Kepala SKAI atau pejabat yang ditunjuk agar diperoleh keyakinan bahwa laporan tersebut telah lengkap dan benar.

5. Tindak lanjut Hasil Audit

- a. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut. Pemantauan atas pelaksanaan tindak lanjut harus dilakukan, agar dapat diketahui perkembangannya dan dapat diingatkan kepada Auditee apabila Auditee belum dapat melaksanakan komitmen perbaikan menjelang atau sampai batas waktu yang dijanjikan.

- b. Analisis kecukupan tindak lanjut. Dari hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, dilakukan analisis kecukupan atas realisasi janji perbaikan yang telah dilaksanakan Auditee. Selanjutnya pengecekan kembali tindak lanjut perludilakukan apabila terdapat kesulitan atau hambatan yang menyebabkan tindak lanjut tersebut tidak dapat dilakukan sebagaimana mestinya.
- c. Pelaporan tindak lanjut. Dalam hal pelaksanaan tindak lanjut tidak dilaksanakan oleh Auditee, maka SKAI memberikan laporan tertulis kepada Direktur Utama dan Dewan Komisaris untuk tindakan lebih lanjut.

f. Pelaksana Audit Operasional

Dalam bukunya Arens et al (2008 : 845-846) mengemukakan bahwa :

“Operational audit are usually performed by one of three group; internal auditors, government auditor, CPA firms”.

Audit operasional dapat dilaksanakan oleh pihak sebagai berikut :

1. Auditor Internal

Auditor internal memiliki posisi yang unik untuk melaksanakan audit operasional. Manfaat yang diperoleh jika auditor internal melakukan audit operasional adalah bahwa mereka menggunakan seluruh waktu kerja untuk perusahaan yang mereka audit. Untuk memaksimalkan efektivitasnya, bagian audit internal harus melapor kepada dewan direksi atau direktur utama. Auditor internal juga harus mempunyai akses dan mengadakan komunikasi yang

berkesinambungan dengan komite auditor dewan direksi. Struktur organisasi ini membantu auditor agar tetap independen.

2. Auditor Pemerintah

Auditor pemerintah melaksanakan audit operasional yang seringkali merupakan bagian dari pelaksanaan audit keuangan. Auditor pemerintahan terdiri dari para akuntan dari Badan Pemeriksa Keuangan dan Pembangunan (BPKP), dahulu Direktorat Jenderal Pengawasan Keuangan Negara (Departemen Keuangan). Auditor pemerintah biasanya member perhatian pada kedua macam pemeriksaan baik untuk keuangan maupun audit operasional.

3. Auditor Eksternal

Pada waktu akuntan publik melakukan audit atas laporan keuangan historis, sebagian dari audit itu biasanya terdiri dari pengidentifikasian masalah-masalah operasional dan membuat rekomendasi yang dapat bermanfaat bagi klien audit. Rekomendasi itu dapat dikatakan secara lisan, tetapi biasanya menggunakan surat manajemen. Pengetahuan dasar mengenai bisnis klien yang dimiliki auditor eksternal dalam melaksanakan audit seringkali memberikan informasi yang berguna dalam memberikan rekomendasi-rekomendasi operasional. Auditor yang mempunyai latar belakang bisnis dan pengalaman yang luas dengan perusahaan-perusahaan serupa akan cenderung lebih efektif dalam membantu klien dengan rekomendasi operasional yang relevan dibandingkan dengan yang tidak mempunyai kualitas seperti itu.

g. Perbedaan Audit Keuangan dan Audit Operasional

Sebelum melaksanakan audit operasional, hendaknya perlu diketahui mengenai perbedaan antara audit operasional dengan audit keuangan biasa.

Menurut Arens et al (2008 : 842) menyatakan :

“The three major differences between operational and financial auditing are the purpose of the audit, distribution of the report, and inclusion of nonfinancial areas in operational auditing”.

Perbedaan audit operasional dan audit keuangan adalah :

- a. Audit keuangan berorientasi pada masa lalu dan lebih menekankan pada apakah informasi historis dicatat dengan benar. Sedangkan audit operasional berorientasi menekankan pada efisiensi dan efektivitas.
- b. Dalam hal distribusi laporan, audit keuangan ditujukan kepada banyak pemakai laporan keuangan dan didistribusikan secara detil. Sedangkan laporan audit operasional sangat berbeda dari satu audit ke audit lainnya karena keterbatasan distribusi operasional dan beragamnya sifat audit untuk efisiensi dan efektivitas.
- c. Pada keterlibatan bidang bukan keuangan, audit operasional mencakup banyak aspek efisiensi dan efektivitas dalam sebuah badan usaha. Audit keuangan dibatasi hanya pada hal-hal yang langsung mempengaruhi kewajaran penyajian laporan keuangan.

2.1.3 Bank

a. Defenisi Bank

Menurut Kasmir (2010) pengertian Bank adalah:

“Bank adalah lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali dana tersebut ke masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Menurut Undang-undang Nomor : 2 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor : 10 Tahun 1998 pengertian Bank yaitu:

“Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.”

Dari uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa Bank adalah suatu badan usaha yang bergerak di bidang jasa keuangan yang usahanya untuk menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat untuk meningkatkan taraf hidup orang banyak.

b. Fungsi dan Tugas Bank

Suyatno, Thomas dalam bukunya “Dasar-Dasar Perkreditan” (2001 : 11), menyatakan tiga fungsi terpenting dari bank, yaitu sebagai berikut :

1. Fungsi sebagai perantara dalam perkreditan

- 1) Kredit aktif, dimana bank bertindak sebagai pemberi kredit
- 2) Kredit pasif, dimana bank bertindak sebagai pihak penerima kredit berupa dana-dana yang dipercayakan kepadanya berupa giro, deposito, dan tabungan.

2. Fungsi sebagai badan yang memberikan jasa perdagangan dalam negeri maupun luar negeri

3. Fungsi sebagai badan yang memiliki wewenang mengedarkan uang baik uang kartal maupun uang giral

Verrin Stuart dalam bukunya "*Bank Politics*" yang dikutip dari Pandia, Frianto (2005) terdapat dua tugas bank yaitu:

1. Sebagai perantara kredit, yakni bank memberikan kredit kepada pihak ketiga dan debitur yang berasal dari simpanan pihak ketiga
2. Menciptakan kredit, yakni meminjamkan dana yang tidak berasal dari dana milik masyarakat.

Ada tiga bentuk atau operasi yang dilakukan bank menurut Pandia, Frianto(2005), yakni:

1. Operasi perkreditan secara aktif yakni tugas bank dalam rangka menciptakan atau memberikan kredit
2. Operasi perkreditan secara pasif yaitu bank dalam menerima simpanan atau dana pihak ketiga yang dipercayakan masyarakat
3. Usaha bank sebagai perantara dalam pemberian kredit

2.1.4 Kredit

a. Pengertian Kredit

Kredit berasal dari bahasa Yunani, *credere* (yang artinya "kepercayaan" atau "amanat") atau dari bahasa latin, *creditum* (yang artinya hampir sama, "kepercayaan akan kebenaran" atau " amanat"). Pengertian kredit menurut Veithzal, Rivai (2007:4) adalah :

"Kredit adalah Penyerahan barang, jasa, atau uang dari satu pihak (kreditor/pemberi pinjaman) atas dasar kepercayaan kepada pihak lain (nasabah atau pengutang / *borrower*) dengan janji membayar dari penerima kredit kepada pemberi kredit pada tanggal yang telah disepakati kedua belah pihak".

Menurut Undang-Undang RI Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan: “Kredit adalah penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan dan kesepakatan pinjam-meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga imbalan atau pembagian hasil keuntungan”.

b. Tujuan Kredit dan Fungsi Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 100), dalam prakteknya tujuan pemberian kredit adalah untuk (1) mencari keuntungan (2) membantu usaha nasabah (3) membantu pemerintah. Dengan demikian tujuan kredit yang diberikan oleh suatu bank yang akan mengemban tugas sebagai *agent of development* adalah untuk:

1. Turut mensukseskan program pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan
2. Meningkatkan aktivitas perusahaan agar dapat menjalankan fungsinya guna menjamin terpenuhinya kebutuhan organisasi
3. Memperoleh laba agar kelangsungan hidup perusahaan terjamin dan dapat memperluas usahanya

Menurut Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti (2004 : 5-6) menyatakan:

“Fungsi kredit dewasa ini pada dasarnya ialah pemenuhan jasa untuk melayani kebutuhan masyarakat (*to serve the society*) dalam rangka mendorong dan melancarkan perdagangan, mendorong dan melancarkan produksi, jasa-jasa dan bahkan konsumsi yang kesemuanya itu pada akhirnya ditujukan untuk menaikkan taraf hidup rakyat banyak”.

Hal yang sama dijelaskan juga oleh Kasmir (2010: 101),

fungsi dari kredit adalah sebagai berikut: (1) untuk meningkatkan daya guna uang, (2) untuk meningkatkan peredaran dan lalu lintas uang, (3) untuk meningkatkan daya guna uang, (4) untuk meningkatkan peredaran barang, (5) sebagai alat stabilisasi ekonomi, (6) untuk meningkatkan pemerataan pendapatan, (7) untuk meningkatkan kegairahan usaha, (8) untuk meningkatkan hubungan internasional.

c. Jenis-Jenis Kredit

Menurut Kasmir (2010 : 103-106) jenis-jenis kredit yang diberikan oleh bank umum untuk masyarakat terdiri dari berbagai jenis kredit antara lain :

1. Kredit dilihat dari segi tujuannya

- 1) Kredit Konsumtif, yaitu kredit yang digunakan untuk dikonsumsi secara pribadi
- 2) Kredit Produktif, yaitu kredit yang diberikan untuk meningkatkan usaha atau produksi atau investasi
- 3) Kredit Perdagangan, yaitu kredit yang diberikan kepada pedagang dan digunakan untuk membiayai aktivitas perdagangannya seperti untuk membeli barang dagangan yang pembayarannya diharapkan dari hasil penjualan barang dagang tersebut.

2. Kredit dilihat dari jangka waktunya

- 1) Kredit Jangka Pendek, yaitu kredit yang berjangka waktu maksimum 1 tahun dan biasanya digunakan untuk keperluan modal kerja
- 2) Kredit Jangka Menengah, yaitu kredit yang berjangka waktu 1 sampai 3 tahun dan biasanya digunakan untuk melakukan investasi
- 3) Kredit Jangka Panjang, yaitu kredit yang berjangka waktu lebih dari 3 tahun

3. Kredit dilihat dari segi jaminannya

- 1) Kredit Tanpa Jaminan, yaitu kredit yang diberikan tanpa jaminan barang atau orang tertentu.
- 2) Kredit Jaminan, yaitu kredit yang diberikan dengan menggunakan suatu jaminan. Jaminan tersebut dapat berupa barang berwujud atau tidak berwujud atau jaminan orang.

4. Kredit dari segi kegunaanya

- 1) Kredit Modal Kerja, yaitu kredit berjangka waktu pendek yang diberikan oleh suatu bank untuk membiayai kebutuhan modal kerja perusahaan sehingga dapat meningkatkan produksi dalam operasionalnya.
- 2) Kredit Investasi, yaitu kredit jangka menengah atau jangka panjang yang diberikan oleh suatu bank untuk melakukan investasi atau penanaman modal, yang ditujukan untuk memperluas usahanya atau membangun proyek/pabrik baru untuk keperluan rehabilitasi.

d. Analisis Kredit

Analisis kredit merupakan salah satu factor yang dapat digunakan sebagai acuan bank apakah permohonan kredit dari nasabah dapat disetujui atau ditolak. Disamping itu, bank perlu melakukan analisis yang mendalam agar bank terhindar dari masalah kredit yang muncul dikemudian hari.

Beberapa prinsip dasar yang digunakan sebelum memutuskan permohonan calon debitur dikenal dengan istilah 5C, penerapan prinsip dasar dalam pemberian kredit serta analisis yang mendalam terhadap calon debitur, perlu dilakukan bank agar bank tidak salah memilih dalam menyalurkan dananya sehingga dana yang disalurkan tersebut terbayar kembali sesuai dengan jangka waktu yang diperjanjikan (Ismail, 2010:111).

2.1.5 Kegiatan Perkreditan

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan aset bank.

Menurut Dendawijaya, Lukman (2001) Kegiatan perkreditan diwujudkan dengan menyalurkan dana dari pihak yang berkelebihan dana (*Idle Fund/Surplus Unit*) kepada pihak yang membutuhkan dana/kekurangan dana. Secara umum kegiatan perkreditan yang dijalankan bank meliputi kegiatan pemberian kredit, administrasi dan pembukuan dan kegiatan supervisi dan pelaporan kredit.

Menurut Suyatno, Thomas (2001) menyatakan sistem dan prosedur umum pemberian kredit adalah sebagai berikut:

1) Permohonan Kredit

Permohonan fasilitas kredit mencakupi:

- 1) Permohonan baru untuk mendapat suatu jenis fasilitas kredit
- 2) Permohonan tambahan suatu kredit yang sedang berjalan
- 3) Permohonan perpanjangan atau pembaharuan masa kredit yang telah berakhir jangka waktunya
- 4) Permohonan-permohonan lainnya untuk perubahan fasilitas kredit yang sedang berjalan

2) Penyelidikan dan Analisis Kredit

Yang dimaksud dengan penyelidikan kredit adalah pekerjaan yang meliputi :

- 1) Wawancara dengan pemohon kredit (debitur)
- 2) Pengumpulan data yang berhubungan dengan permohonan kredit yang diajukan nasabah
- 3) Pemeriksaan atas kebenaran dan kewajiban mengenai hal-hal yang ditemukan nasabah dan informasi lain yang diperoleh

- 4) Penyusunan laporan seperlunya mengenai hasil penyidikan yang telah dilaksanakan

Sedangkan analisis kredit adalah pekerjaan yang meliputi:

- 1) Mempersiapkan pekerjaan-pekerjaan penguraian dari segala aspek baik keuangan maupun non keuangan untuk mengetahui kemungkinan dapat atau tidaknya dipertimbangkan suatu permohonan kredit
- 2) Menyusun laporan analisis yang diperlukan, yang berisi penguraian dan kesimpulan serta penyajian alternatif-alternatif sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan pimpinan atau permohonan kredit nasabah

Menurut Kasmir (2010 : 109) terdapat prinsip-prinsip pemberian kredit yang dikenal dengan prinsip 5 C yaitu :

- 1) *Character*, tujuannya adalah untuk memberikan keyakinan kepada bank bahwa sifat atau watak dari orang-orang yang akan diberikan kredit benar benar dipercaya. *Character* merupakan ukuran untuk menilai kemauan nasabah membayar kreditnya.
- 2) *Capacity*, untuk melihat kemampuan calon nasabah dalam membayar kredit yang dihubungkan dengan kemampuannya mengelola bisnis serta kemampuannya mencari laba. Sehingga pada akhirnya akan terlihat kemampuannya dalam mengembalikan kredit yang disalurkan
- 3) *Capital*, untuk mengetahui sumber-sumber pembiayaan yang dimiliki nasabah terhadap usaha yang akan dibiayai bank.

- 4) *Collateral*, merupakan jaminan yang diberikan calon nasabah baik yang berupa fisik maupun non fisik. Fungsi jaminan adalah sebagai pelindung bank dari resiko kerugian.
- 5) *Condition of Economy*, dalam menilai kredit hendaknya juga dinilai kondisi ekonomi sekarang dan untuk di masa yang akan datang sesuai sektor masing-masing.

Ada beberapa aspek yang perlu dianalisis secara tepat dan akurat selain prinsip-prinsip penilaian kredit tadi, menurut Kasmir (2010 : 112-114) adalah sebagai berikut:

- a. Aspek hukum

Analisis aspek ini pada prinsipnya untuk menilai kebutuhan ketentuan-ketentuan legalitas oleh perusahaan yang meliputi akte pendirian serta izin usaha.

- b. Aspek pemasaran

Penilaian aspek pemasaran produk memang perlu diketahui bank mengenai kemungkinan pangsa pasar yang dapat dicapai oleh produk tersebut terutama bagi produk-produk yang masih baru. Oleh karena itu dalam menganalisis aspek ini perlu diperhatikan daya serap, daya beli konsumen serta prospek produk tersebut di masa yang akan datang.

- c. Aspek keuangan

Penilaian keadaan keuangan pemohon kredit dapat dilakukan dengan menganalisis laporan keuangan, analisis laporan keuangan meliputi arus kas, rasio-rasio keuangan dan modal kerja perusahaan. Dari data tersebut

dapat diketahui mengenai kinerja perusahaan dan selanjutnya dapat dibuat proyeksi keadaan keuangan perusahaan di masa yang akan datang.

d. Aspek teknis/operasi

Tujuan penilaian aspek teknis ini antara lain untuk mengetahui sejauh mana kemampuan dan kesiapan teknis perusahaan dalam melakukan operasinya. Penilaian aspek ini meliputi penilaian alat-alat produksi, tenaga kerja yang terlatih, proses produksi yang meliputi rencana dan supervisi serta jaminannya bahan baku secara kontinyu dan letak lokasi proyek.

e. Aspek manajemen

Penilaian aspek manajemen perusahaan dimaksudkan untuk mengetahui kegiatan dan kemampuan juga kecakapan manajemen perusahaan. Penilaian aspek ini sangat kompleks perlu diperoleh informasi secara informal melalui pihak yang tahu persis keadaan manajemen perusahaan yang bersangkutan

f. Aspek sosial dan ekonomi

Aspek ini berkaitan dengan lingkungan dimana proyek tersebut berlokasi yang meliputi reaksi masyarakat setempat atas proyek yang dibiayai dan kemungkinan kesempatan kerja.

g. Aspek amdal

Aspek ini berkaitan dengan dampak lingkungan dimana proyek tersebut berada.

3) Keputusan atas Permohonan Kredit

Dalam hal ini yang dimaksud dengan keputusan adalah setiap tindakan pejabat yang berdasarkan wewenangnya berhak mengambil keputusan berupa menolak, menyetujui dan atau mengusulkan permohonan fasilitas kredit kepada pejabat yang lebih tinggi. Setiap keputusan permohonan kredit harus memperhatikan penilaian syarat-syarat umum yang pada dasarnya tercantum dalam laporan pemeriksaan kredit dan analisis kredit.

4) Penolakan Permohonan Kredit

Penolakan permohonan dapat terjadi apabila :

- a. Penolakan permohonan kredit yang secara nyata dianggap oleh bank secara teknis tidak memenuhi persyaratan
- b. Adanya keputusan penolakan dari direksi mengenai permohonan kredit.

5) Persetujuan Permohonan Kredit

Yang dimaksud dengan persetujuan permohonan kredit adalah keputusan bank untuk menyetujui sebagian atau seluruh permohonan kredit dari calon debitur. Untuk melindungi kepentingan bank dalam pelaksanaan persetujuan tersebut, maka biasanya ditegaskan terlebih dahulu syarat-syarat fasilitas kredit dan prosedur yang harus ditempuh oleh nasabah. Langkah-langkah yang harus diambil antara lain : 1) Surat penegasan persetujuan permohonan kredit kepada pemohon, 2) Peningkatan jaminan, 3) Penandatanganan perjanjian kredit, 4) Informasi untuk bagian lain, 5) Pembayaran bea materai kredit, 6) Asuransi barang jaminan, dan 7) Asuransi kredit.

6) Pencairan Fasilitas Kredit

Pencairan fasilitas kredit adalah setiap transaksi dengan menggunakan kredit yang telah disetujui oleh bank. Dalam prakteknya, pencairan kredit ini

berupa pembayaran dan atau pemindah bukuan atau beban rekening pinjaman atau fasilitas lainnya. Bank hanya menyetujui pencairan kredit oleh nasabah, bila syarat-syarat yang harus dipenuhi nasabah telah dilaksanakan. Perlu diketahui bahwa peningkatan jaminan dan penandatanganan warkat-warkat kredit (perjanjian kredit) mutlak harus mendahului pencairan kredit. Apabila calon debitur telah memenuhi semua syarat dan prosedur kredit, maka bank akan menetapkan waktu kapan kredit tersebut dapat dicairkan. Pada saat kredit akan dicairkan terlebih dahulu debitur akan menandatangani surat atas akte perjanjian kredit beserta lampiran-lampirannya.

Surat perjanjian kredit (SPK) ini, dapat dibuat dibawah tangan atau dibuat dihadapan notaris, tergantung dari besar kecilnya kredit yang diberikan atau sesuaidengan kebijakan masing-masing bank. Lampiran dari SPK biasanya terdiri dari akte perikatan jaminan (hipotik, fiducia, atau gadai), surat kuasa penjual dan lain-lain.

7) Pelunasan Fasilitas Kredit

Pelunasan kredit adalah dipenuhinya semua kewajiban nasabah terhadap bank yang berakibat hapusnya ikatan perjanjian kredit. Administrasi dan pembukuan kredit merupakan proses pengumpulan dan penyajian informasi perkreditan pada suatu bank. Dari administrasi kredit ini, bank dapat memberikan pendapat sebagai alat dalam menunjang kegiatan-kegiatan dari proses perkreditan secara perorangan maupun secara keseluruhan. Selain itu juga dapat dijadikan sebagai alat dalam sistem dokumentasi perkreditan. Dengan adanya administrasi kredit yang baik, dapat mempermudah laporan-laporan di bidang perkreditan baik untuk kepentingan intern (kepentingan manajemen dan dewan komisaris) maupun

untuk pihak eksteren (Bank Indonesia dan debitur). Supervisi merupakan kegiatan yang dilakukan bank ketika bank telah memberikan pinjaman dana kepada nasabahnya. Kegiatan ini dilakukan bank sebagai bentuk pembinaan dan pengawasan atas dana yang telah dipinjamkan. Bank harus memastikan bahwa kegiatan usaha nasabah mampu untuk menutupi pinjaman yang telah dicairkan bank, sehingga pembinaan dan pengawasan secara terus menerus harus dilakukan untuk menghindari munculnya kredit bermasalah atau ketidakmampuan nasabah dalam mengembalikan pinjaman beserta bunganya kepada bank.

2.1.6 Pengertian Efektivitas

Keberhasilan dan kepemimpinan seringkali diukur dengan konsep efektivitas. Walaupun banyak orang setuju bahwa manajemen berperan dalam mencapai efektivitas organisasi, tetapi sulit memperinci apa yang dimaksud konsep efektivitas. Definisi efektivitas menurut Arens et al (2008 : 842) adalah sebagai berikut :

“In general, effectiveness refers to meeting objectives”

Sedangkan menurut Bayangkara, IBK (2008 : 14), pengertian efektivitas yaitu:

“Efektivitas dapat dipahami sebagai tingkat keberhasilan suatu perusahaan untuk mencapai tujuannya.”

Sawyer, Lawrence B (2005 : 211), pengertian efektifitas yaitu :

”Efektivitas menekankan hasil aktual dari dampak atau kekuatan untuk menghasilkan dampak tertentu. Sesuatu bisa jadi efektif tetapi tidak efisien dan ekonomis”.

a. Efektivitas Kegiatan Perkreditan

Secara umum dapat dikatakan bahwa efektivitas mengacu pada pencapaian tujuan. Jadi sebenarnya efektivitas berhubungan dengan hasil operasi. Demikian juga dengan efektivitas kegiatan perkreditan di bank. Jika kita ingin untuk menilai efektivitas kegiatan perkreditan, maka kita dapat menilai apakah pelaksanaan kredit tersebut telah mencapai sasaran tertentu.

Kegiatan perkreditan merupakan proses pembentukan asset bank yang berisiko karena dimiliki oleh pihak luar yaitu debitur. Dalam upaya untuk memperoleh keuntungan dari kegiatan perkreditan yang dijalankan bank maka bank harus menjamin bahwa kegiatan perkreditan telah berjalan dengan efektif dimana manajemen telah mampu mencapai sasaran kredit yaitu peningkatan tingkat kolektibilitas kredit (*performance loan*) dan penurunan jumlah kredit bermasalah (*non performance loan*).

Menurut Siamat, Dahlan (2001) kredit bermasalah disebabkan karena penyimpangan dalam pelaksanaan kegiatan kredit dan lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit. Lemahnya sistem administrasi dan pengawasan (supervisi) kredit menyebabkan kredit yang secara potensial akan mengalami masalah tidak dapat dilacak secara dini, sehingga bank terlambat melakukan pencegahan.

Menurut Ismail (2010 : 218) ada beberapa faktor penyebab kredit bermasalah yang berasal dari intern bank yaitu :

1. Analisis yang dilakukan oleh pejabat bank yang kurang tepat, sehingga tidak dapat memprediksi apa yang akan terjadi dalam kurun waktu selama jangka waktu kredit
2. Adanya kolusi antara pejabat bank yang menangani kredit dengan nasabah, sehingga bank memutuskan kredit yang tidak seharusnya diberikan

3. Keterbatasan pengetahuan pejabat bank terhadap jenis usaha debitur, sehingga tidak dapat melakukan analisis kredit dengan tepat dan akurat
4. Campur tangan terlalu besar dari pihak terkait misalnya Komisaris, Direktur Utama Bank sehingga petugas tidak dapat independent dalam memutuskan kredit
5. Kelemahan dalam melakukan pembinaan dan monitoring kredit

Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa tinggi atau rendahnya tingkat kredit bermasalah sangat dipengaruhi oleh keefektifan kegiatan perkreditan yang dijalankan bank, sehingga tingkat kredit bermasalah dapat digunakan sebagai alat analisa dalam menilai keefektifan kegiatan perkreditan.

Kolektibilitas/kualitas kredit adalah penggolongan/pengelompokkan nasabah atau peminjam berdasarkan kemampuan nasabah/peminjam untuk membayar pokok dan bunga kredit yang telah diterimanya dari bank. Kualitas kredit menurut Peraturan Bank Indonesia No.9/6/PBI/2007 Tentang Penilaian Kualitas Aktiva Bank Umum yaitu :

1. Lancar, merupakan pembayaran tepat waktu, perkembangan rekening baik dan tidak ada tunggakan serta sesuai dengan persyaratan kredit.
2. Dalam Perhatian Khusus, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan ataubunga sampai dengan 90 hari.
3. Kurang lancar, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan bunga melampaui 90 hari sampai dengan 180 hari.
4. Diragukan, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 180 hari sampai dengan 270 hari.

5. Macet, dimana terdapat tunggakan pembayaran pokok dan atau bunga melampaui 270 hari

Non Performing Loan (NPL) merupakan kredit bermasalah yaitu kredit yang masuk ke dalam kategori Kurang Lancar, Diragukan, dan Macet berdasarkan kriteria yang sudah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Besarnya rasio NPL suatu Bank ditentukan oleh kolektibilitas kreditnya karena rasio NPL adalah perbandingan antara kredit yang tidak lancar/bermasalah dengan jumlah kredit yang diberikan. Semakin rendah rasio NPL berarti semakin baik kualitas NPL. Jika kredit yang diberikan betul-betul tepat sasaran dan tepat guna, maka efektivitas kegiatan perkreditan akan tercapai dengan kata lain NPL yang dicapai akan rendah yaitu di bawah standar maksimal, yaitu 5% (Kasmir, 2003).

Proses perkreditan yang baik diharapkan dapat menekan NPL sekecil mungkin. Tingkat NPL sangat dipengaruhi oleh kemampuan bank dalam menjalankan kegiatan perkreditan dengan baik, yaitu kegiatan pemberian kredit, administrasi dan pelaporan termasuk tindakan pemantauan (*monitoring*) setelah kredit disalurkan dan tindakan pengendalian bila terdapat indikasi penyimpangan kredit maupun indikasi gagal bayar.

2.2 Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Tahun	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Mega Prameswari (2008)	Audit Operasional atas Prosedur Pemberian Kredit Untuk Meningkatkan Efektivitas Dan Efisiensi	Hasil penelitiannya adalah membuktikan bahwa struktur organisasi sudah cukup baik, hal ini terjadi

		pada PT. Bank BNI (Persero) Tbk	karena pemisahan tugas dan wewenang dari masing-masing unit. Dan adanya audit operasional ternyata dilihat bahwa pemberian kredit telah sesuai dengan prosedur yang ada. Selain itu audit operasional meningkatkan efektivitas dan efisiensi melalui saran dan rekomendasi yang diberikan auditor untuk menindak lanjuti.
2.	Voni Astari (2011)	Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kegiatan Perkreditan di Bank Nagari Cabang Utama Padang	Sebaiknya audit operasional tidak hanya dilakukan satu kali dalam setahun mengingat perkreditan merupakan kegiatan utama di Bank dan mengandung banyak resiko
3.	Ika Caya Putri	Pengaruh Audit Internal	Hasil penelitian ini

	(2010)	terhadap Kebijakan dalam Pemberian Kredit	membuktikan bahwa semakin baik suatu bank menerapkan audit internal maka kebijakan pemberian kreditnya akan berkurang karena Bank akan lebih selektif dalam pemberian kredit sehingga volume kredit yang diberikan akan semakin berkurang.
4.	Lilis Suhijahwati Ningsih (2008)	Audit Operasional Terhadap Penjualan untuk Mengevaluasi Efisiensi dan Efektivitas pada Hotel Pelangi Malang	Hotel atau perusahaan tersebut telah menjalankan fungsi-fungsi penjualan dengan baik sehingga tercipta efisiensi dan efektivitas yang menghasilkan laba bagi perusahaan.
5.	Feri Ardiansyah (2006)	Audit Operasional dalam menunjang penjualan pada PT. Sang Hyang	PT. Sang Hyang telah melaksanakan audit operasional dengan cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari hasil

			wawancara dimana tahap audit operasional penyusunan laporan penjualan dan tindak lanjut telah dilakukan dengan cukup baik
6.	Lestari (2009)	Analisis Penerapan Menejemen Resiko dalam pengelolaan resiko kredit dan resiko operasional pada PT. Bank BRI medan	Hasil menunjukkan bahwa kebijakan dan prosedur serta strategi yang diterapkan Bank didalam penerapan menejemen resiko sebagai upaya pengelolaan resiko kredit dan operasional dalam bidang perkreditan telah mengikuti standar-standar minimal yang ditetapkan Bank indonesia tentunya disesuaikan dengan lingkup usaha Bank tersebut.

7.	Nani Triwahyuniati (2008)	Analisis dana pihak ketiga dan kredit bermasalah terhadap laba pada PT.Bank Nagari tbk	Berdasarkan hasil penelitian Bank Nagari DPK mempunyai pengaruh yang signifikan dan positif terhadap perolehan Laba sedangkan NPL mempunyai pengaruh yang negatif dan signifikan terhadap perolehan Laba
----	---------------------------------	---	--

Penelitian yang telah dijelaskan diatas dapat memeberikan gambaran bagi penulis mengenai bagaimana peranan dan fungsi audit operasional bagi perusahaan. Selain itu juga memberikan pengetahuan lebih bagi penulis mengenai metode dan analisis yang dilakukan.

Penulis melakukan perbandingan penelitian terdahulu dimaksudkan untuk dijadikan bahan perbandingan karena adanya beberapa persamaan didalam penelitian dan mempelajari metode yang digunakann serta membandingkan hasil penelitian yang telah peneliti terdahulu lakukan. Namun, disini objek yang diteliti berbeda, dimana yang dijadikan oleh penulis adalah audit operasional kegiatan perkreditan pada PT. Bank Sumut, sedangkan objek dari penelitian terdahulu adalah audit operasional pada perusahaan dan bank yang berbeda.

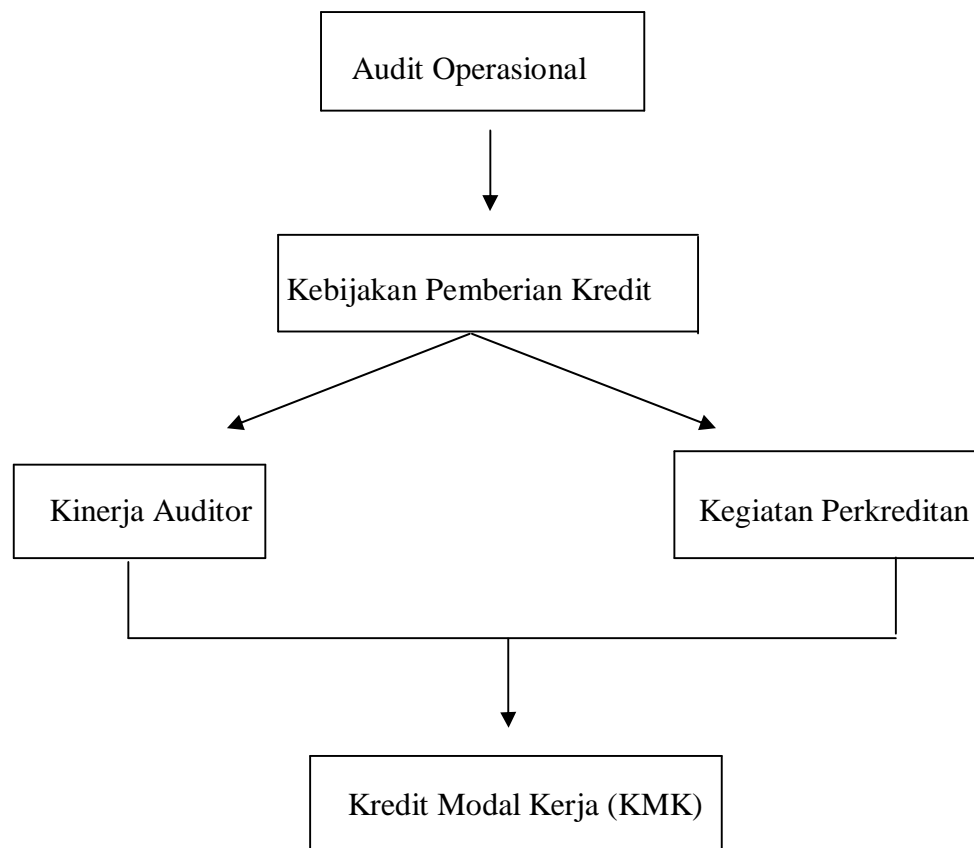
2.3 Kerangka Berfikir

Tingkat kesehatan bank adalah penilaian atas suatu kondisi laporan keuangan bank pada periode dan saat tertentu sesuai dengan standar bank indonesia (Riyadi, 2004). Untuk menilai kesehatan suatu bank dapat diukur dengan berbagai . penilaian kesehatan akan berpengaruh terhadap kemampuan bank dan loyalitas nasabah terhadap bank yang bersangkutan.

Masalah yang sering dihadapi bisnis perbankan adalah adanya persaingan tajam yang tidak seimbang yang dapat menimbulkan ketidakefisienan manajemen yang berakibat pada munculnya kredit bermasalah yang dapat menimbulkan penurunan laba. Pemberian kredit yang dilakukan oleh bank mengandung resiko yaitu berupa tidak lancarnya pembayaran kredit atau dengan kata lain disebut kredit bermasalah (*Non Performance Loan*), sehingga akan mempengaruhi kinerja bank (Restiyana, 2011).

Menurut Riyadi (2007) *Non Performance Loan* adalah kredit yang mengalami kesulitan didalam penyelesaian kewajibannya terhadap bank, baik dalam bentuk pengembalian kembali pokoknya dan atau pembayaran bunga, denda keterlambatan, serta ongkos-ongkos bank yang bersangkutan. Besarnya NPL yang diperbolehkan oleh bank indonesia saat ini adalah maksimal 5%. Jika melebihi maka akan mempengaruhi penilaian tingkat kesehatan bank yang bersangkutan, yaitu akan mengurangi nilai/skor yang diperolehnya.

Berdasarkan masalah yang ada, dapat ditarik suatu kerangka konseptual dari peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada gambar berikut:



Gambar 2.1 Kerangka konseptual

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian pada dasarnya adalah suatu kegiatan pengumpulan, pengolahan, penyajian, dan analisa data yang dilakukan dengan metode ilmiah secara efisien dan sistematis yang hasilnya berguna untuk mengetahui persoalan atau keadaan dalam usaha pengembangan ilmu pengetahuan atau membuat keputusan dalam rangka pemecahan masalah.

Dalam penelitian ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif, dimana penelitian dilakukan pada Bank Sumut Kantor Pusat mengenai peranan audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan.

Penulis berusaha mengumpulkan data dengan keadaan sebenarnya, menyajikan serta menganalisis data sehingga dapat memberikan gambaran yang cukup jelas atas objek yang diteliti. Adapun tujuan dari penelitian deskriptif adalah untuk membuat deskripsi, gambaran secara sistematis, faktual mengenai fakta-fakta, sifat-sifat serta hubungan antar fenomena yang diselidiki mengenai situasi yang sebenarnya dari objek penelitian.

3.2 Definisi Operasional

Definisi operasional adalah definisi yang didasarkan atas hal yang diamati. Definisi operasional merupakan acuan dari landasan teoritis yang digunakan untuk melakukan penelitian dimana antara variable yang satu dengan variabel yang lainnya dapat dihubungkan sehingga peneliti dapat menyesuaikan dengan data yang diinginkan.

Variabel dalam penelitian ini merupakan yaitu Audit Operasional dalam Pemberian Kredit. Adapun definisi operasional variabel adalah bentuk pemeriksaan untuk menilai, menganalisis, meninjau ulang hasil program kredit, apakah telah berjalan secara efektif, serta mengidentifikasi kekurangan-kekurangan dan kemudian melaksanakan pengujian dan penelaahan atas ketidakhematan maupun ketidakefektifan untuk selanjutnya memberikan rekomendasi–rekomendasi perbaikan demi tercapainya suatu tujuan .

Efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan program pemberian Kredit yang telah ditetapkan dalam mendukung pencapaian tujuan. Efektivitas juga menjelaskan sejauh mana aktivitas-aktivitas yang diselenggarakan berdasarkan program pemberian kredit memberikan kontribusi bagi keberhasilan perusahaan. Jika hasil kegiatan semakin mendekati sasaran, berarti efektivitasnya semakin tinggi.

3.3 Tempat dan Waktu Penelitian

1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilaksanakan pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan yaitu perusahaan yang bergerak dibidang perbankan yang beralamat di Jln. Imam Bonjol No. 18 Medan Polonia.

2. Waktu Penelitian

Adapun waktu penelitian direncanakan pada bulan November sampai dengan februari 2018. Lebih jelasnya waktu penelitian dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1

Waktu Penelitian

No	Jenis Kegiatan	Tahun 2017 dan 2018															
		Desember				Januari				Februari				Maret			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Pengajuan Judul	■															
2	Penyusunan Proposal		■	■	■												
3	Bimbingan Proposal					■	■	■	■								
4	Seminar Proposal								■								
5	Penyusunan Skripsi									■	■	■	■				
6	Bimbingan Skripsi													■	■	■	■
7	Sidang Meja Hijau																■

3.4 Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari :

1. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh dari sumber pertama atau yang diperoleh langsung dari objek yang diteliti. Sebagai contoh jawaban dari pertanyaan yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak yang berwenang untuk memberikan data dan informasi dalam pengumpulan data yang diperlukan dalam penelitian. Dalam penelitian ini, data primer yang dikumpulkan penulis

adalah hasil wawancara dengan auditor internal kredit dan karyawan bagian kredit.

2. Data Skunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh sehubungan dengan perusahaan yang telah terdokumentasi, seperti struktur organisasi perusahaan, sejarah perusahaan, SOP perkreditan dan data kolektibilitas kredit tahun 2013 s.d 2017 dan data kelengkapan lainnya.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam rangka memperoleh data-data yang diperlukan untuk menunjang penelitian ini, penulis menggunakan teknik-teknik pengumpulan data yang terdiri dari:

1. Penelitian Lapangan yaitu peninjauan langsung pada perusahaan yang diteliti untuk memperoleh data primer. Adapun kegiatan yang dilakukan adalah wawancara, yaitu melakukan penelitian langsung pada Bank Sumut untuk mendapatkan data dan informasi yang diperlukan dengan melakukan tanya jawab dengan pihak-pihak yang terlibat langsung dalam audit operasional serta pihak-pihak yang erat hubungannya dengan penelitian.
2. Penelitian Kepustakaan yaitu teknik pengumpulan data untuk memperoleh data sekunder dengan cara membaca dan mempelajari buku-buku, serta literatur-literatur yang ada hubungannya dengan masalah yang sedang diteliti yang berguna sebagai pedoman teoritis pada waktu melakukan penelitian lapangan dan untuk mendukung serta menganalisa data.

3.6 Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode analisis deskriptif.

Menurut sugiyono (2010: 206) yang dimaksud dengan analisis deskriptif adalah:

“Analisis deskriptif merupakan kegiatan setelah data dari seluruh responden terkumpul. Kegiatan dalam analisis data ini mengelompokkan data berdasarkan variabel dan jenis responden, menstabilasi data berdasarkan variabel dari seluruh responden, menyajikan data dari setiap variabel yang diteliti, melakukan perhitungan untuk menjawab rumusan masalah”.

Penelitian ini dirancang dengan membandingkan kenyataan yang ada dilapangan dengan teori serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang isinya berkaitan erat dengan masalah yang diteliti sehingga dari data tersebut dapat ditarik kesimpulan dan saran-saran. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan konsep yang diamati. Penjelasan audit operasional dilakukan berdasarkan penjabaran pelaksanaan audit operasional pada Bank Sumut Kantor Pusat sesuai dengan tahap-tahap pelaksanaannya kemudian penulis menganalisis kesesuaian pelaksanaan audit dengan standar pelaksanaan audit yang telah diatur Bank Indonesia, sedangkan peranan audit operasional ditekankan pada efektivitas yaitu dengan mendeskripsikan peran audit operasional dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan dengan melakukan analisis terhadap tingkat kolektibilitas kredit bermasalah tahun 2013 s.d 2017.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

4.1.1 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.1.1 Deskriptif Audit Operasional Kegiatan Perkreditan PT. Bank Sumut

Audit internal sebagai pelaksana audit operasional pada Bank Sumut membantu pihak manajemen dalam usaha mencapai efektivitas kegiatan operasional. Selain itu kegiatan ini dilajukan untuk mendeteksi berbagai kemungkinan terjadi penyimpangan atau kesalahan.

4.1.2.2 Deskriptif Kredit Bermasalah (NPL) pada PT. Bank Sumut

Non performing loan (NPL) yang baik dalam suatu bank dibawah 5%. Besarnya tingkat NPL dapat mempengaruhi jumlah penyaluran kredit pada periode berikutnya. PT. Bank Sumut setiap tahunnya berusaha menurunkan tingkat non performing loan (NPL) dengan cara melakukan kredit selektif terhadap calon debiturnya. Namun pada tahun-tahun tertentu NPL justru mengalami kenaikan dan sedikit penurunan. Kenaikan ini diantaranya disebabkan oleh adanya krisis global dan inflasi dalam perekonomian masyarakat. Sedangkan penurunan NPL disebabkan oleh kebijakan bank yang melakukan kredit selektif. Terbukti dengan adanya kredit selektif ini, tingkat NPL mengalami penurunan walaupun hanya sedikit. Menurut SE BI No.3/30 DPNP Tanggal 14 Desember 2001, NPL dapat dihitung dengan menggunakan rumus berikut ini :

$$\text{NPL \%} = \frac{\text{Kredit Bermasalah}}{\text{Kredit Yang Disalurkan}} \times 100$$

Adapun informasi mengenai besarnya NPL pada PT. Bank Sumut dapat dilihat dalam Catatan Atas Laporan Keuangan Tahunan. Besarnya tingkat suku bunga kredit PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk. dari laporan tersebut selama periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 dapat dilihat dalam tabel di bawah ini :

Tabel 4.1
Kualitas Kredit
Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan
Periode Tahun 2013-2017

Kualitas Kredit	2013	2014	2015	2016	2017
Lancar	14.534.365.6 13.011	15.491.992. 928.191	15.864.141 .332.037	16.608.40 9.400.989	17.501.844 .573.957
DPK	300.394.652. 671	323.209.294 .788	432.755.96 0.854	353.042.0 50.311	393.251.02 6.267
Kurang lancar	44.349.270.4 13	29.487.052. 059	27.844.045 .558	20.078.18 3.456	17.021.276 .039
Diragukan	31.383.967.8 27	35.091.689. 518	47.544.439 .639	15.129.72 3.100	29.372.780 .949
Macet	437.098.748. 379	675.239.346 .619	569.148.17 8.515	580.275.1 95.994	524.193.56 4.028
Kredit yang disalurkan	15.347.592.2 52.301	16.555.020. 311.176	16.941.433 .956.603	17.576.93 4.553.849	18.465.683 .221.240

Sumber: Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa Bank Sumut juga mengalami kredit bermasalah yang akan mempengaruhi efektivitas kredit yang dijalankan. Untuk mengetahui tingkat NPL kredit yang dialami Bank Sumut, tabel dibawah ini akan membahas hal tersebut.

Tabel 4.2

Non Performing Loan

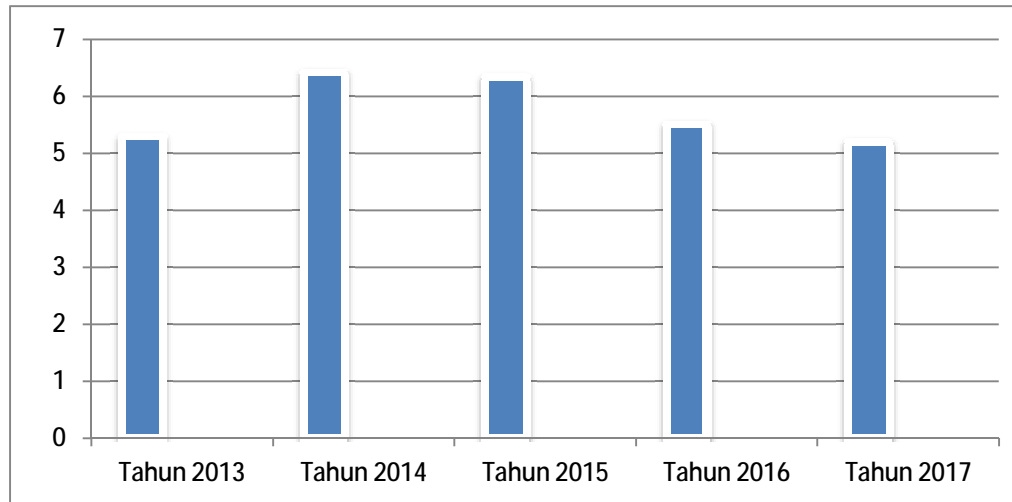
Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

Periode Tahun 2013-2017

Tahun	Kredit yang disalurkan	Kredit bermasalah	NPL (%)
2013	15.347.592.252.301	813.226.639.290	5,29 %
2014	16.555.020.311.176	1.063.027.382.984	6,42 %
2015	16.941.433.956.603	1.074.292.624.566	6,34 %
2016	17.576.934.553.849	968.525.152.861	5,51 %
2017	18.465.683.221.240	963.838.647.283	5,21 %

Sumber: Data Diolah

Dari tabel 4.2 diatas untuk mempermudah melihat perkembangan kenaikan/penurunan *Non Performing Loan* (NPL) pada PT. Bank Sumut tersebut maka penulis menggambarkan dalam bentuk grafik sebagai berikut ini :



Gambar 4.2 Non Performing Loan (NPL) Pada PT. Bank Sumut Kantor Pusat Medan

$$Tahun\ 2013 = \frac{813.226.639.290}{15.347.592.252.301} \times 100$$

$$Tahun\ 2013 = 5,29\%$$

$$Tahun\ 2014 = \frac{1.063.027.382.984}{16.555.020.311.176} \times 100$$

$$Tahun\ 2014 = 6,42\%$$

$$Tahun\ 2015 = \frac{1.074.292.624.566}{16.941.433.956.603} \times 100$$

$$Tahun\ 2015 = 6,34\%$$

$$Tahun\ 2016 = \frac{968.525.125.861}{17.576.934.553.849} \times 100$$

$$Tahun\ 2016 = 5,51\%$$

$$Tahun\ 2017 = \frac{963.838.647.283}{18.465.683.221.240} \times 100$$

$$Tahun\ 2017 = 5,21\%$$

Dari data diatas dapat dilihat bahwa NPL kredit pada tahun 2013 sebesar 5,29% yang telah mencapai batas maksimum NPL kredit yang telah ditentukan oleh Bank Indonesia. Ketika dilakukan audit, auditor menemukan bahwa permasalahan kredit yang dihadapi oleh Bank Sumut bagian penagihan kredit tidak bekerja secara maksimal yang dibuktikan dengan tidak adanya bukti atau arsip yang diberikan oleh bagian penagihan untuk memberitahukan nasabah tentang kreditnya sebelum dibayar sehingga membuat nasabah terbiasa dengan kondisi demikian.

Pada tahun 2014 jumlah kredit naik hingga 6,42% karena setelah dilakukan audit ternyata hal ini disebabkan oleh pelemparan kredit yang menurun, kemampuan bayar nasabah menurun disebabkan oleh faktor ekonomi masyarakat yang rata-rata berkebun (sawit dan karet) menurun karena harga komoditi tersebut anjlok dan hal ini tidak bisa dihindari, auditor merekomendasikan agar bagian penagihan melakukan pembinaan terhadap nasabah agar dapat membayar kreditnya walaupun hal ini tidak dapat dipaksakan karena memang harga komoditi perkebunan nasabah menurun.

Pada tahun 2015 NPL kredit dari 6,42% menjadi 6,34% yaitu sekitar 0,08% sedikit mengalami penurunan walaupun tetap dalam keadaan tidak memadai. Setelah dilakukan audit ternyata hal ini disebabkan karena audit internal melakukan recovery mengenai informasi tentang nasabah.

Pada tahun 2016 NPL kredit hingga 5,51% karena setelah dilakukan audit operasional kredit, bagian penagihan kredit Bank Sumut mengindahkan rekomendasi dari auditor internal atau SPI yaitu melakukan perubahan atau bagian penagihan berkomitmen untuk bekerja dengan maksimal, meningkatkan frekuensi

kunjungan ke nasabah-nasabah mendokumentasikan setiap surat peringatan dan komitmen terhadap nasabah sehingga efektivitas kredit dapat ditingkatkan sebesar 0,83%.

Pada tahun 2017 NPL kredit kembali menurun dari 5,51% menjadi 5,21%, hal ini disebabkan karena audit operasional terus melakukan perbaikan untuk meningkatkan efektivitas nkegiatan perkreditan walaupun masih dalam tingkat diatas normalitas, setidaknya menurunkan resiko kredit macet dalam beberapa tahun terakhir ini.

Dari penjelasan diatas maka dapat penulis simpulkan bahwa fluktuasi tingginya persentase non performing loan (NPL) pada Bank Sumut dipengaruhi oleh berbagai faktor, kemampuan nasabah dalam melunasi kredit tepat pada waktunya. NPL tertinggi terjadi pada tahun 2014 sebesar 6,42% yang diakibatkan oleh adanya krisis global dan inflasi yang cukup tinggi.

Hal ini menyebabkan pihak bank harus mengeluarkan kebijakan untuk mengatur besarnya tingkat suku bunga kredit agar tidak terjadi banyaknya kredit macet, sehingga tingkat NPL dapat tetap terjaga. Berdasarkan hasil analisis penulis dan teori diketahui bahwa NPL pada periode tahun 2013 sampai dengan tahun 2017 cenderung mengalami naik turun. Karena sudah melebihi batas wajar tingkat NPL yaitu diatas 5%, Bank tetap dinyatakan dalam kondisi tidak sehat. Dengan demikian pihak bank mendapatkan keuntungan dari kredit bermasalahnya yang dicatat sebagai pendapatan lain pada laporan laba rugi.

4.2. PEMBAHASAN

4.2.1 Prosedur Pemberian Kredit Pada PT. Bank Sumut

4.2.1.1 Proses Kredit Baru

1. Prosedur permohonan kredit
 - a. Mengisi formulir permohonan kredit secara lengkap dan melengkapi data identitas, kegiatan usaha, keuangan dan agunan.
 - b. Pengecekan awal dan memverikasi data yang diterima dari calon nasabah tidak terdapat kejanggalan serta mengecek barang jaminan yang diberikan.
2. Prosedur pengumpulan data & verifikasi data. Menindaklanjuti disposisi dengan menyiapkan rencana kunjungan ke calon debitur untuk mengumpulkan banyak informasi yang mungkin dibutuhkan.
3. Analisis kredit mengecek ulang data dari nasabah, mewawancarai calon nasabah dan mengunjungi tempat usaha dan jaminan nasabah yang dituangkan dalam laporan kunjungan usaha. Analisis kredit membuat memorandum usulan kredit (MUK) atau proposal kredit dengan melampirkan dokumen pendukung dengan ditandatangani oleh pihak terkait sebelum diajukan kepada komite kredit. Proposal kredit dan MUK diajukan kepada komite kredit untuk pengambilan keputusan apakah usulan kredit disetujui atau ditolak.
4. Prosedur pemutus kredit, CS kredit memberikan informasi penerimaan atau penolakan kredit kepada calon debitur. Jika disetujui maka kredit akan direalisasikan dan debitur harus membawa dokumen-dokumen asli yang dibutuhkan serta syarat lain yang berkaitan dengan realisasi kredit.
5. Prosedur perikatan kredit, melakukan registrasi perjanjian kredit dan memastikan seluruh persyaratan kredit telah dipenuhi.

6. Prosedur perikatan jaminan, Adm Kredit membuat perjanjian kredit dan jaminan kredit dengan calon debitur dihadapan pejabat yang diberi kuasa oleh direksi yang kemudian dibuat formulir Persetujuan Pembekuan Kredit (PPK) dan didistribusikan kepada bagian yang terkait.
7. Prosedur pencairan kredit, Adm Kredit menyimpan data dan mengimput data untuk realisasi kredit dan bagian dana mencairkan kredit berdasarkan promes atau media lain dari Adm. Kredit.
8. Prosedur pencairan kredit, Adm Kredit mengarsip dokumen-dokumen kredit dan mengecek ulang sekurang-kurangnya 6 bulan sekali.

4.2.1.2 Pelaksanaan Audit Operasional

Audit operasional pada Bank Sumut dilaksanakan oleh auditor internal yang disebut sebagai bagian SPI (Satuan Pengawas Intern) pada bank ini, dalam struktur organisasi SPI berada dibawah Direksi dan diatas seksi atau bagian-bagian lain. Posisi SPI yang tinggi membuat SPI dapat melakukan pengawasan secara leluasa terhadap kegiatan operasional bank dan mempertanggungjawabkan hasil pengawasan yang dilakukan kepada direksi dan dewan pengawas.

SPI merupakan perpanjangan tangan dari dewan pengawas dan direksi untuk melaksanakan pengawasan pada Bank Sumut karena dewan pengawas atau direksi tidak terjun langsung dalam operasional Bank. Tugas pokok dari SPI Bank Sumut adalah untuk memastikan bahwa kegiatan operasional pada Bank Sumut telah berjalan sesuai dengan peraturan dan ketentuan-ketentuan yang berlaku.

Auditor internal atau SPI pada Bank Sumut juga memiliki sikap yang independen dalam mengaudit. SPI tidak memiliki hubungan kekerabatan dengan

karyawan atau pimpinan Bank dan auditor bebas dari campur tangan pihak lain dalam melaksanakan audit sehingga auditor bisa bekerja secara independen tanpa tekanan dari pihak manapun dan tidak memihak siapapun. Perencanaan audit dilakukan oleh SPI. Walaupun audit program yang disusun belum terinci sebagaimana mestinya. SPI tetap membuat program audit tahunan atau audit rutin. Pelaksanaan audit dilakukan berdasarkan prosedur-prosedur yang telah ditetapkan sesuai dengan audit program yang telah disusun.

Auditor atau SPI mengkomunikasikan hasil audit dengan segera kepada pihak-pihak yang berkepentingan yang meminta audit yaitu dalam *exit meeting* dan membuat Laporan Hasil Audit (LHA). Selain itu SPI juga meminta pihak auditee untuk segera memperbaiki temuan yang dilaporkan dengan memberikan batas waktu perbaikan. Auditor juga mengawasi kemajuan tindak lanjut terhadap temuan audit yang dilakukan oleh manajemen objek yang diaudit dan memastikan bahwa tindakan manajemen telah dilaksanakan secara efektif.

Audit Operasional terhadap kredit juga dilakukan oleh SPI sebagaimana dijelaskan dibawah ini:

1. Pemeriksaan Kredit

Berdasarkan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang ada pada Bank Sumut hal-hal yang perlu diperiksa dalam pemeriksaan kredit adalah:

a. Proses kredit (*credit processing*)

Untuk memastikan bahwa proses kredit telah dilaksanakan berdasarkan SOP atau ketentuan yang berlaku

b. Kebijakan kredit

1) Prinsip kehati-hatian

Bank wajib melakukan analisis yang mendalam (itikad dan kemampuan) calon debitur, menerapkan ketentuan secara konsisten dan membuat ketentuan untuk mengelola resiko pemberian kredit.

2) Organisasi dan mamajemen perkreditan

Memisahkan unit marketing dan bisnis dengan *risk management* untuk menghindari terjadinya *conflict of interest*

3) Manejemen resiko

Credit risk adalah kredit yang diberikan tidak dapat ditarik kembali.

Market risk adalah resiko yang disebabkan oleh harga pasar dan instrument keuangan (kurs, suku bunga, harga saham dan lain-lain).

Operational risk adalah resiko yang disebabkan oleh kegagalan suatu proses atau lemahnya pengawasan atau tidak patuh dengan ketentuan.

Country risk adalah resiko yang disebabkan kondisi yang tidak baik dari suatu negara.

c. Kebijakan Persetujuan Kredit

Pemberian kredit harus didasarkan atas permohonan tertulis dari calon debitur, data/informasi evaluasi harus menggambarkan kondisi atau potensi 5c dari calon debitur dan keputusan pemberian kredit harus didasarkan pada hasil evaluasi yang dibuat secara tertulis.

d. Dokumentasi dan Administrasi Kredit

Dokumen harus dipisahkan antara legal file dan nonlegal file.

e. Pengawasan kredit

Fungsi pengawasan merupakan tanggungjawab setiap tingkat manajemen yang harus mengupayakan pencegahan secara dini dan

harus tercermin dalam struktur pengendalian intern. Pengawasan terhadap kredit yang beresiko tinggi harus lebih intensif dan meliputi review internal oleh unit kerja terpisah.

f. Penyelesaian kredit bermasalah

Membentuk tim tugas khusus untuk menyelesaikan kredit bermasalah.

4.2.1.3 Pelaporan Hasil Audit

Setelah selesai melaksanakan audit bidang kredit, auditor akan membahas hasil audit dalam *exit meeting* bersama pimpinan Bank Sumut dan menyampaikan temuan serta rekomendasi yang diberikan atas temuan tersebut.

Setelah *exit meeting* dilakukan, auditor akan membuat Laporan Hasil Audit (LHA) yang mencakup semua pemeriksaan termasuk kredit yang akan direview oleh direksi. Setelah semua dianggap sesuai dengan standar pelaporan menurut SPFAIB laporan hasil audit akan ditandatangani oleh direktur utama Bank Sumut.

4.2.1.4 Tindak Lanjut Hasil Audit

SPI memantau pelaksanaan tindak lanjut yang dilakukan oleh bagian kredit sampai batas waktu perbaikan yang telah ditentukan agar permasalahan yang sama tidak terjadi kembali dimasa yang akan datang. Pemantauan dilakukan melalui *exit meeting* lanjutan atau melihat laporan hasil tindak lanjut apakah rekomendasi telah dilaksanakan atau belum.

Hasil tindak lanjut secara tertulis akan dilaporkan oleh SPI kepada direktur utama dan dewan komisaris atau pengawas Bank Sumut. Jika dilihat dari sisi bagian kredit biasanya bagian kredit Bank Sumut selalu merealisasikan

rekomendasi yang diberikan oleh tim audit. Hal-hal yang diungkapkan dalam laporan tindak lanjut hasil audit meliputi kelemahan-kelemahan atau pelanggaran yang ditemukan pada saat dilakukan pemeriksaan, batas waktu perbaikan dan komitmen perbaikan yang akan dilakukan.

4.2.1.5 Dokumentasi dan Administrasi

SPI Bank Sumut selalu mendokumentasikan dan mengadministrasikan bukti-bukti dokumen sejak perencanaan tahap awal audit, persiapan, pelaksanaan, analisis, evaluasi sampai pada pelaporan hasil audit. Dokumen akan disimpan rapi pada lemari arsip di bagian SPI Bank Sumut.

Dilihat dari pelaksanaan audit operasional kredit yang dilakukan oleh Bank Sumut secara keseluruhan telah sesuai dengan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB) yang menjadi dasar pelaksanaan audit intern Bank Sumut sehingga dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan audit operasional kredit pada Bank Sumut telah memadai.

4.2.1.6 Peranan Audit Operasional dalam Meningkatkan Efektivitas Kredit

Efektivitas suatu kegiatan dapat dilihat dari hasil operasi kegiatan tersebut. Begitu pula efektivitas kegiatan perkreditan dapat dicapai jika sasaran atau tujuan kredit telah tercapai. Efektivitas kredit dapat dilihat dari tingkat *non performance loan* nya diatas 5% seperti ketentuan dari Bank Indonesia dalam PBI No.8 tahun 2006.

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa audit operasional pada Bank Sumut kurang berperan serta dalam meningkatkan efektivitas kegiatan perkreditan pada Bank Sumut. Tingkat Non Performance Loan pada Bank Sumut ini masih dalam keadaan kurang baik, akan tetapi dapat dilihat dari penurunan tingkat

kollektibilitas Non Performance Loan setiap tahunnya, meskipun penurunan yang terjadi tidak drastis tetapi dikedepannya dengan tetap diterapkannya kebijakan audit operasional ini akan dapat mengecilkan tingkat NPL Bank Sumut. Untuk masa yang akan datang diharapkan pelaksanaan audit operasional kredit terus dilakukan untuk menekan resiko-resiko kredit yang dapat menyebabkan NPL kredit meningkat.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Pelaksanaan audit operasional pada Bank Sumut dilakukan oleh auditor intern selaku SPI di bank tersebut. Secara umum auditor internal telah melaksanakan tugasnya sebagai auditor yang independen dan sesuai Standar Praktik Profesi Audit Internal (SPPAI) yang menjadi pedoman auditor dalam bertugas. Pelaksanaan audit operasional kredit pada Bank Sumut dilakukan berdasarkan Peraturan Bank Indonesia No. 1/6/PBI.1999 tentang Penugasan Direktur Kepatuhan dan Penerapan Standar Pelaksanaan Fungsi Audit Intern Bank (SPFAIB).

Audit operasional kurang berperan dalam meningkatkan efektivitas kredit pada Bank Sumut. Hal ini dilihat dari tingkat NPL kredit setiap tahunnya telah mencapai batas minimum yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia yaitu diatas 5%. Tingkat Non Performance Loan pada Bank Sumut ini masih dalam keadaan kurang baik, akan tetapi dapat dilihat dari penurunan tingkat kolektibilitas Non Performance Loan setiap tahunnya, meskipun penurunan yang terjadi tidak drastis tetapi dikedepannya dengan tetap diterapkannya kebijakan audit operasional ini akan dapat mengecilkan tingkat NPL Bank Sumut. Untuk masa yang akan datang diharapkan pelaksanaan audit operasional kredit terus dilakukan untuk menekan resiko-resiko kredit yang dapat menyebabkan NPL kredit meningkat.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam hal ini penulis dapat menyarankan hal hal sebagai berikut:

1. Pihak Bank juga diharapkan bisa memberikan data-data yang sangat diperlukan untuk mendapatkan hasil penelitian yang lebih obyektif tanpa ada sesuatu yang ditutup-tutupi demi keabsahan hasil penelitian. Dan juga lebih memperhatikan faktor faktor apa saja yang mempengaruhi debitur mengalami gagal bayar dalam proses kreditnya.
2. Untuk penelitian berikutnya diharapkan agar mahasiswa/i dapat mengkaji peningkatan efektivitas dengan mengamati aspek-aspek lain yang juga dapat meningkatkan efektivitas kredit. Selain itu peneliti berikutnya semoga dapat menjelaskan proses temuan-temuan yang ditemukan

DAFTAR PUSTAKA

- Arens, A.Alvin, Elder, J.Randal, Beasley, S.Mark. 2008. *Auditing and Assurance Service An Integrated Approach*. 12th Edition, Upper Sadel River, New Jersey, Pearson Education International.
- Bayangkara, IBK. 2008. *Audit Manajemen (Prosedur dan Implementasi)*. Jakarta: Salemba Empat.
- Boynton, Johnson, Kell. 2003. *Modern Auditing*. Jilid I, Edisi ke-7. Jakarta: Erlangga.
- Dendawijaya, Lukman. 2001. *Manajemen Perbankan*. Jakarta : Ghalia Indonesia
- Firdaus, H. Rachmat dan Maya Ariyanti. 2004. *Manajemen Perkreditan Bank Umum*. Edisi ke-2, Bandung : Alfabeta
- Ismail. 2010. *Akuntansi Bank : Teori dan Aplikasi dalam Rupiah*. Edisi ke-1. Jakarta: Kencana
- Kasmir. 2003. *Manajemen Perbankan*. Edisi Ke 4. Jakarta : Raja Grafindo Persada
- Kasmir. 2010. *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Mulyadi. 2010. *Auditing*. Jilid I, Cetakan ke Tujuh, Jakarta: Salemba Empat.
- Prameswari, Messa. 2008. *Audit operasional atas prosedur Pemberian Kredit untuk Meningkatkan Efektivitas dan Efisiensi Pada PT. BNI (Persero) Tbk Wilayah 02 Padang*. Padang : Fakultas Ekonomi Universitas Andalas.
- Republik Indonesia. 1998. *Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan*. Jakarta

Alvin A. Arens dkk. 2001. Auditing dan Pelayanan Verifikasi. Jilid 2, Cetakan keenam, Jakarta: Indeks Gramedia.

Sukrisno Agoes, Jan Hoesada. Bunga Rampai. 2009. Auditing. Jilid 1, Jakarta:Salemba Empat.

Mulyadi Universitas Gajah Mada. 2002. Auditing. Edisi 6. Jakarta:Salemba Empat.

Drs.Ismail,MBA, Ak. 2010. Akuntansi dan Bank. Jakarta:Kencana Prenada Media Group.

Vallery G. Kumaat. 2011. Internal Audit. Jakarta:Erlangga